

ANALISIS FAKTOR TURKI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS VISA

KUNJUNGAN BAGI INDONESIA TAHUN 2021

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MOCH IQBAL MAULANA AZIS

19323168

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**ANALISIS FAKTOR TURKI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS VISA
KUNJUNGAN BAGI INDONESIA TAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MOCH IQBAL MAULANA AZIS

19323168

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR TURKI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI INDONESIA TAHUN 2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

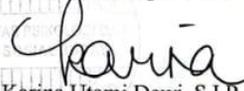
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

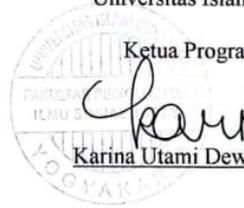


Pada Tanggal
25 Agustus 2023

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

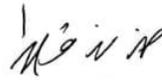


Dewan Penguji

1. Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
2. Hadza Min Fadly Robbi, S.I.P., M.Sc.
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan







PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023



Moch Iqbal Maulana Azis

DAFTAR ISI

ANALISIS FAKTOR TURKI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI INDONESIA TAHUN 2021	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II	19
DASAR KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI	19
2.1 Politik Luar Negeri Turki Era Presiden Erdogan	19
2.2 Kebijakan Luar Negeri Turki di Asia Pasifik	24
2.3 Hubungan Bilateral Turki-Indonesia	28
2.3.1 Era Sukarno	28
2.3.2 Era Suharto	29
2.3.3 Masa Reformasi	30
2.3.4 Kebijakan Bebas Visa Turki terhadap Indonesia	32

BAB III	37
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP INDONESIA	37
3.1 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Turki	37
3.1.1 Kondisi Domestik Turki.....	37
3.1.2 Kondisi Ekonomi dan Militer	40
3.1.3 Konteks Internasional.....	44
3.2 Peran Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Turki.....	46
BAB IV	50
PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan Turki dan Indonesia	25
Tabel 1.2 Pernyataan Policy Influencer	44

DAFTAR SINGKATAN

MVPP	: <i>Marine Vessel Power Plant</i>
PPP	: <i>Private Public Partnership</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
FTA	: <i>Free Trade Area</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
IT-CEPA	: <i>Indonesia-Turkey Comprehensif Economic Partnership Agreement</i>
WNI	: <i>Warga Negara Indonesia</i>
UU	: <i>Undang-undang</i>
ERDF	: <i>European Regional Development Fund</i>
OIC	: <i>Organization of Islamic Cooperation</i>
OKI	: <i>Organisasi Kerjasama Islam</i>
AKP	: <i>Adelet ve Kalkinma Partisi</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PKS	: <i>Partai Keadilan Sosial</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Turki sejak abad ke-15 di masa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Pada saat itu banyak kegiatan atau pertemuan diplomatik antara Kesultanan Utsmaniyah dan berbagai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki dianggap penting dengan salah satu bukti dideklarasikannya "Join Declaration Indonesia-Turkey: Towards an Enhanced Partnership in a New World Setting" oleh Presiden dari kedua negara tepatnya pada tanggal 5 April 2011 (Indonesia 2020) Peluncuran tersebut menunjukkan komitmen untuk mengembangkan kerjasama di bidang politik-keamanan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, termasuk industri strategis.

Bersambung hingga pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Turki untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa rentetan kegiatan diantaranya yang bersifat terbatas yaitu *pertemuan tete* atau pertemuan empat mata yang hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan. Selain itu, kunjungan tersebut memunculkan beberapa kerjasama bilateral dengan jangkauan yang lebih luas. Diantaranya adalah kerjasama di bidang kesehatan serta dibukanya perjanjian kerjasama *Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau lebih dikenal dengan IT-CEPA (HUMAS 2017). Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Turki tidak hanya berfokus kepada hubungan bilateral saja melainkan ingin bersama-sama Turki untuk memberikan dampak positif secara global seperti turut andil mengatasi krisis Qatar atau

penanganan terorisme global. Turki juga memberikan dukungan penuh kepada Indonesia atas pencalonan yang ditujukan dalam dewan keamanan PBB di tahun 2019-2020 sehingga dukungan tersebut sangat diapresiasi melalui pernyataan Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan balasan ke Turki (Syakur 2017).

Maka dari itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjalankan kerjasama bilateral baik di tingkat regional maupun internasional. Beberapa waktu lalu Indonesia dan Turki kembali menjalin kerjasama. kerjasama tersebut muncul dengan adanya Keputusan Presiden nomor 4930 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2021 dan resmi berlaku sejak 24 Desember 2021. Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk upaya dari pemerintah Turki untuk meningkatkan perekonomian negara serta menarik wisatawan asing. Selain itu, kebijakan yang dibuat tidak lain untuk memperkuat hubungan antara Turki dengan Indonesia (Mutiah 2021).

Kebijakan bebas visa yang diberlakukan oleh pemerintah Turki juga pernah diberlakukan oleh negara lain salah satunya Indonesia. Dalam penerapan kebijakan tersebut terdapat pertimbangan yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan bagi warga negara asing, kemudian mempererat hubungan Turki dengan negara lain khususnya Indonesia. Turki juga mengambil perbandingan dari peraturan atau kebijakan yang pernah diterapkan di Indonesia salah satunya melihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang dasar pertimbangan terbentuknya kebijakan bebas visa (Syakir 2020). Dalam pemberlakuan kebijakan tersebut perlu diperhatikan terkait timbal balik dan manfaat yang didapatkan khususnya untuk peningkatan perekonomian. Selain itu, ada yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa diantaranya tetap tegaknya kedaulatan negara dan tidak mengganggu keamanan negara merupakan salah satu tujuan diberlakukannya kebijakan bebas visa.

Kebijakan bebas visa melibatkan dari peran Uni Eropa dalam upaya liberalisasi visa yang mereka lakukan. Gerakan tersebut memberikan dorongan kepada negara-negara lain untuk mengambil sisi positif dari pengembangan yang dilakukan oleh Uni Eropa khususnya dalam upaya implementasi kebijakan bebas visa termasuk Turki yang masih menjalin hubungan dengan Uni Eropa. Hal ini dilakukan oleh Turki tidak lain untuk menjaga keseimbangan politik dan upaya kesejahteraan ekonomi untuk bersaing di kancah internasional. Selain keberadaan Turki yang sangat strategis, secara geopolitik keterlibatan Turki juga penting bagi Uni Eropa khususnya dalam menjaga keamanan di perbatasan dan sebagai anggota G20 (Orak 2021).

Dalam perspektif ketenagakerjaan diberlakukannya kebijakan bebas visa belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini ditimbang dari adanya tindakan penyalahgunaan kebijakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum khususnya dalam penyalahgunaan tenaga kerja asing. Dengan adanya peristiwa atau kejadian tersebut menjadikan terhambatnya kebijakan yang akan dilaksanakan dengan kondisi yang ditakutkan akan menimbulkan masalah baru khususnya terhadap masyarakat sekitar atau warga negara Indonesia itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa yang sudah tertera dalam undang-undang oleh pemerintah Indonesia ditimbang dari munculnya atau datangnya tenaga kerja asing secara ilegal, sehingga kebijakan hukum yang dilanggar pastinya terkait perekrutan tenaga kerja asing dan pelanggaran terhadap ketenagakerjaan. Dalam hal ini negara (pemerintah) perlu melakukan keterbukaan atau pendekatan untuk pengembangan pemberlakuan kebijakan bebas visa, kemudian kebijakan yang nantinya akan diterapkan ditimbang kembali khususnya dalam akibat atau efek positif dan negatif yang nantinya akan berdampak pada negara itu sendiri. Selain itu negara (pemerintah) perlu melakukan koordinasi atau kerjasama dengan negara lain yang bersangkutan khususnya dalam tindakan atau proses pengambilan tenaga kerja asing. Dalam penerapan kebijakan bebas

visa perspektif ketenagakerjaan maka negara harus tegas dalam menegakkan hukum dan konsisten apabila terdapat pelanggaran dalam perekrutan atau pengambilan tenaga kerja asing (Wicipto Setiadi 2019).

Optimalisasi manfaat serta potensi kerugian perlu diterapkan dalam pemberlakuan kebijakan bebas visa yang muncul dari kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menunjukkan pariwisata serta upaya dalam proses peningkatan ekonomi negara. Dalam pelaksanaan kebijakan negara perlu bekerja sama dengan negara lain dan pastinya melibatkan tatanan hukum serta mementingkan kedaulatan negara dan asas kebermanfaatannya bagi warga negara asing yang berkunjung atau diperbolehkan masuk ke negara Indonesia. Dalam proses penerapan kebijakan bebas visa yang pernah dilakukan oleh negara Indonesia terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan karena melihat celah dari kebijakan yang telah dibuat. Pelanggaran terbanyak terdapat dari warga asing yang memakai visa on arrival untuk bekerja di Indonesia namun tidak membayar pajak yang diwajibkan oleh kementerian tenaga kerja dalam hal ini adalah penyelundupan atau pelanggaran ketenagakerjaan.

Selain perlunya pertimbangan dari manfaat dalam pemberlakuan kebijakan tersebut, negara perlu melihat dasar hukum dalam penerapan kebijakan bebas visa. Koordinasi antar aktor negara juga diperlukan dalam proses daya tarik wisata, hal ini diperlukan karena demi persiapan kunjungan atau tempat wisata yang akan dipromosikan dalam program penerapan kebijakan bebas visa. Selain terkait tempat wisata, koordinasi yang dilakukan oleh aktor negara juga berdampak terhadap persiapan kondisi politik dalam negeri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta pengkondisian dan melihat kestabilan politik di Indonesia. Jika terdapat ketidakstabilan politik dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa maka dapat mengakibatkan

kerugian terhadap negara khususnya dalam daya tarik wisatawan mancanegara, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2014 yang mana wisatawan mengalami penurunan sebanyak 807,4 ribu lebih sedikit daripada tahun 2013 (Sudarwati 2015).

Konsep diplomasi bilateral yang diharapkan oleh Indonesia dan Turki akan memberikan dampak positif dari pelbagai sektor, seperti ekonomi, pariwisata, transportasi, dan bidang lainnya yang ditujukan untuk kepentingan nasional kedua negara. Indonesia dan Turki memiliki konsep kebijakan luar negeri yang hampir sama. Turki berdasarkan konsep presiden Kemal Ataturk yaitu *peace at home, piece on the world* . Sedangkan kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan satu tujuan yaitu *melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi* (Indrawati 2020). Kedua konsep kebijakan luar negeri tersebut menjadi salah satu acuan perjalanan kontribusi diplomasi bilateral Indonesia dan Turki.

Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh pemerintah Turki merupakan variabel yang perlu mereka buat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara khususnya wisatawan dari Indonesia. Hal ini dirasa sangat perlu dalam proses perbaikan ekonomi khususnya di masa pandemi. Indonesia sendiri beberapa kali mengeluarkan undang-undang terkait pemberian bebas visa, dengan adanya kebijakan tersebut akan diberikan kepada negara yang ingin bekerja sama dan mau memberikan keuntungan satu sama lain bagi pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah Turki juga hampir sama dengan pernyataan pada kebijakan tentang pernyataan bahwa pemerintah memberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhadap penerima bebas visa kunjungan. Salah satu alasan presiden Erdogan memberikan kebebasan wisata terhadap warga negara Indonesia adalah karena Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang melimpah dan juga letak keberadaan negara yang cukup strategis sehingga dapat meningkatkan proses perekonomian lintas dan antar negara.

Indonesia sendiri sudah pernah menerapkan bebas visa kunjungan kepada kurang lebih 169 negara di dunia (Syakir 2020).

Kebijakan bebas visa menjadi salah satu hal yang penting pada saat itu karena memiliki tujuan untuk menarik wisatawan mancanegara. Selain berefek pada sektor pariwisata kebijakan tersebut juga berimbas pada peningkatan ekonomi dan perdagangan yang bisa dimasukkan melalui kebijakan tersebut. Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh Turki dalam kebijakan bebas visa selain pariwisata yaitu komoditas sinetron yang berasal dari Turki menarik perhatian wisatawan sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan menuju ke Turki. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pastinya pihak pemerintah menyiapkan dan lebih menjaga keamanan negara sehingga kejadian yang tidak diinginkan seperti bom Bali yang pernah terjadi di Indonesia tidak terjadi di Turki (Ferika Pujiharini 2016). Dampak yang diberikan dari adanya kebijakan bebas visa cukup beraneka ragam dan berbeda di setiap negara. Dari beberapa analisis data disebutkan bahwa ada dampak positif dari diberlakukannya kebijakan bebas visa, yaitu peningkatan wisatawan internasional.

Terdapat satu kasus yang melibatkan Turki dan Uni Eropa dalam penerapan kebijakan visa Schengen, yaitu visa yang dikhususkan untuk kunjungan wisata atau bisnis ke negara-negara anggota Uni Eropa. Dalam hal ini, Turki menjadi satu-satunya negara yang tidak mendapatkan izin untuk memasuki wilayah uni Eropa. Penyebab tidak adanya perizinan tersebut karena penolakan dari negara-negara anggota Uni Eropa dengan keterlibatan Turki. Di satu sisi, liberalisasi visa memunculkan indikasi hubungan baik antara Uni Eropa dan Turki. Indikasi tersebut diwujudkan dengan terjaganya keamanan di lintas batas Turki-Yunani yang menjadi pintu gerbang masuknya imigran gelap ke negara-negara anggota Uni Eropa. Adanya kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa kepada Turki merupakan hasil dari proses bagi negara Turki

untuk mendapatkan akses bebas visa ke semua negara anggota uni Eropa sebagai bentuk hasil dari kerjasama antara keduanya. Berkembangnya liberalisasi bisa dianggap sebagai variabel yang penting untuk memunculkan keadaan dan situasi yang saling menguntungkan. Kerjasama antara Uni Eropa dan Turki berdampak pada meningkatnya hak asasi manusia di Turki. Kebijakan tersebut juga berdampak dalam proses meningkatkan sektor bisnis, pendidikan, dan pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan ekonomi khususnya bagi negara-negara anggota Uni Eropa (Stiglmyer 2012).

Meskipun kebijakan bebas visa sudah diterapkan mulai akhir tahun 2021, namun pemerintah Turki dan Indonesia masih perlu mengkaji tentang kesepakatan yang telah dibuat terlebih meninjau dari manfaat serta konsekuensi pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pastinya kembali ke tujuan awal diberlakukannya kebijakan bebas visa oleh pemerintah Turki terhadap warga negara Indonesia adalah untuk mempererat kembali hubungan antara kedua negara dan adanya kebutuhan untuk saling meningkatkan ekonomi pendidikan, pariwisata dan sektor-sektor yang lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa acuan penulis adalah *“Mengapa pada akhir tahun 2021 pemerintah Turki menerapkan kebijakan bebas visa terhadap WNI?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka penulis memiliki tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan bebas visa yang dibuat oleh Turki terhadap Indonesia;

2. Untuk mengetahui proses dinamika kerjasama antara Turki dan Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis kebijakan pemerintah Turki yang menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia khususnya di akhir tahun 2021 yang pada saat itu masih dalam keadaan pandemi. Alasan penulis mengambil kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh pemerintah Turki adalah karena pemerintahan Turki di bawah presiden Erdogan menjadi salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Indikasi kedekatan hubungan antara pemerintah Turki dan Indonesia dimulai ketika kunjungan balasan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 yang menghasilkan beberapa kerjasama atau kesepakatan antara Turki dan Indonesia. Pendekatan pariwisata yang melibatkan wisatawan Indonesia menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah Turki menerapkan sebuah kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan bebas visa terhadap warga negara Indonesia. Selain itu, melalui Duta Besar (Dubes) RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa permohonan bebas visa dari pemerintah Turki kepada warga negara Indonesia merupakan kebijakan yang sudah dibuat dan berkaca dari pemerintah Indonesia yang telah memberikan bebas visa bagi negara Turki saat tahun 2016 (Syakir 2020). Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Turki juga sebagai bentuk jalan pembuka kerjasama serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dibuatnya kebijakan bebas visa oleh pemerintah Turki mendapatkan reaksi yang cukup baik terutama dari warga negara Indonesia yang ingin berlibur ke Turki. Hal ini tidak lain karena kebijakan yang dimaksud dapat memberikan dampak positif yang melibatkan kedua negara. Dalam penulisan proposal ini, penulis menemukan beberapa literatur dan karya ilmiah terkait

penerapan kebijakan bebas visa oleh pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan sebagai data pendukung dan penunjang dalam menyelesaikan penelitian ini. Tinjauan pustaka yang dipakai oleh penulis berupa jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Pertama adalah tulisan Saskia Indrawati pada karya ilmiahnya yang berjudul *Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan Bilateral Indonesia Turki (2004 - 2019)*. Hubungan diplomasi Indonesia dan Turki sudah terjalin sejak tahun 1950. Hal inilah yang memunculkan keinginan kuat bagi kedua negara untuk saling bekerjasama secara praktis dan mempererat hubungan bilateral guna memperbaiki bidang yang lebih luas diantaranya terhadap kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. Bentuk dari adanya kerjasama dari kedua negara adalah tercapainya nilai perdagangan yang meningkatkan ekonomi dari masing-masing negara. Di sisi lain kebijakan ekonomi luar negeri tersebut berpengaruh terhadap ekspor dan impor Indonesia-Turki dari tahun 2004 sampai dengan 2019. Perekonomian memiliki kaitan terhadap penggunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pernyataan di atas menjadi salah satu langkah dari diplomasi ekonomi bilateral khususnya melalui perdagangan internasional untuk meluaskan dan meningkatkan ekonomi antara Indonesia dan Turki. Karena kesepakatan dari kedua negara tersebut memberikan dampak yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sangat membantu pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kerjasama bilateral yang melibatkan Indonesia dan Turki juga berdampak pada kebutuhan perindustrian sehingga negara maju akan mengambil bahan baku yang berasal dari negara berkembang. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ladang untuk membuka serta mendorong para investor asing untuk turut meningkatkan perkembangan ekonomi global (Indrawati 2020).

Kemudian dalam tulisan Syakir yang berjudul *Pengaruh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Terhadap Keamanan Negara Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Keimigrasian* dijelaskan terkait Peraturan Presiden yang menjadi pertimbangan untuk peningkatan hubungan Indonesia dengan negara lain. Selain itu pasal yang dibuat sebagai acuan dan cerminan bagi Turki yang sebelumnya telah diberikan hak bebas visa oleh negara Indonesia. Pada umumnya kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara di sisi lain juga dapat meningkatkan wisatawan asing mancanegara. Namun dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah menjaga keseimbangan serta kedaulatan negara republik Indonesia. Kebijakan ini juga memberikan kebebasan bagi berpindahannya seseorang yang telah melewati batas wilayah suatu negara tanpa melanggar hukum yang sudah sah, sehingga dengan itu banyak mendapat respon positif dengan tetap mengikuti ketentuan yang sudah di atur dalam undang-undang (Syakir 2020).

Yang ketiga, dalam tulisan Alexander Stiglmyer yang berjudul "*Visa-Free Travel for Turkey in Everybody's Interest*" yang menyatakan bahwa terjadi sebuah kesepakatan antara uni Eropa dan Turki untuk mengembangkan liberalisasi visa. Hal ini juga mendorong kerjasama untuk Turki yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan hubungan dengan uni Eropa. Dari perkembangan liberalisasi bisa dianggap sebagai variabel yang cukup penting untuk meningkatkan keadaan dan situasi yang saling menguntungkan. Selain memperbaiki hubungan antara uni Eropa dan Turki kebijakan tersebut juga berdampak dalam proses peningkatan pada sektor bisnis, pendidikan, dan pariwisata sehingga juga mendukung peningkatan dan perkembangan ekonomi Eropa (Stiglmyer 2012).

Kemudian dalam tulisan Wicipto Setiadi dan Rakha Aditya Afriza, dalam perspektif ketenagakerjaan diberlakukannya kebijakan bebas visa belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini

ditimbang dari adanya tindakan penyalahgunaan kebijakan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum khususnya dalam penyalahgunaan tenaga kerja asing. Dengan adanya peristiwa atau kejadian tersebut menjadikan terhambatnya kebijakan yang akan dilaksanakan dengan kondisi yang ditakutkan akan menimbulkan masalah baru khususnya terhadap masyarakat sekitar atau warga negara Indonesia itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa yang sudah tertera dalam undang-undang oleh pemerintah Indonesia ditimbang dari munculnya atau datangnya tenaga kerja asing secara ilegal, sehingga kebijakan hukum yang dilanggar pastinya terkait perekrutan tenaga kerja asing dan pelanggaran terhadap ketenagakerjaan. Dalam hal ini negara (pemerintah) perlu melakukan keterbukaan atau pendekatan untuk pengembangan pemberlakuan kebijakan bebas Visa, kemudian kebijakan yang nantinya akan diterapkan ditimbang kembali khususnya dalam akibat atau efek positif dan negatif yang nantinya akan berdampak pada negara itu sendiri. Selain itu negara (pemerintah) perlu melakukan koordinasi atau kerjasama dengan negara lain yang bersangkutan khususnya dalam tindakan atau proses pengambilan tenaga kerja asing. Dalam penerapan kebijakan bebas Visa perspektif ketenagakerjaan maka negara harus tegas dalam menegakkan hukum dan konsisten apabila terdapat pelanggaran dalam perekrutan atau pengambilan tenaga kerja asing (Wicipto Setiadi 2019).

Kemudian tulisan dari Yuni Sudarwati, dalam pemberlakuan kebijakan bebas Visa yang diterapkan oleh negara perlu juga dilihat dari optimalisasi manfaat serta potensi kerugian apabila kebijakan tersebut diterapkan. kebijakan bebas visa merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menunjukkan pariwisata serta upaya dalam proses peningkatan ekonomi negara. Dalam pelaksanaan kebijakan negara perlu bekerja sama dengan negara lain dan pastinya melibatkan tatanan hukum serta mementingkan kedaulatan negara dan asas kebermanfaatan bagi warga

negara asing yang berkunjung atau diperbolehkan masuk ke negara Indonesia. Dalam proses penerapan kebijakan bebas visa yang pernah dilakukan oleh negara Indonesia terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan karena melihat celah dari kebijakan yang telah dibuat. Pelanggaran terbanyak terdapat dari warga asing yang memakai visa on arrival untuk bekerja di Indonesia namun tidak membayar pajak yang diwajibkan oleh kementerian tenaga kerja dalam hal ini adalah penyelundupan atau pelanggaran ketenagakerjaan. Selain negara perlu menimbang dari manfaat dalam pemberlakuan kebijakan tersebut negara perlu melihat dasar hukum dalam penerapan kebijakan bebas visa. Koordinasi antar aktor negara juga diperlukan dalam proses daya tarik wisata, hal ini diperlukan karena demi persiapan kunjungan atau tempat wisata yang akan dipromosikan dalam program penerapan kebijakan bebas visa. Selain terkait tempat wisata, koordinasi yang dilakukan oleh aktor negara juga berdampak terhadap persiapan kondisi politik dalam negeri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta pengkondisian dan melihat kestabilan politik di Indonesia. Jika terdapat ketidakstabilan politik dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara khususnya dalam daya tarik wisatawan mancanegara, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2014 yang mana wisatawan mengalami penurunan sebanyak 807,4 ribu lebih sedikit daripada tahun 2013 (Sudarwati 2015).

Beberapa kutipan yang diambil oleh penulis di atas berbincang tentang indikasi kebijakan serta upaya yang pernah dibuat dan saat ini diterapkan, baik dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah Turki. Dari pengambilan referensi di atas disebutkan bahwa hubungan bilateral yang terjadi dan melibatkan kedua negara bertujuan untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata, di sisi lain upaya tersebut juga berdampak pada sektor-sektor yang memiliki kaitan dengan dua sektor di atas. Kemudian Penjabaran terkait dampak negatif dan positif yang akan terjadi bila diberlakukan kebijakan bebas visa bagi suatu negara. Hal ini menjadi penting karena

dalam penerapan kebijakan tersebut diutamakan kedaulatan bagi negara yang memberlakukan sebuah kebijakan. Namun dari materi yang dicantumkan belum membahas terkait alasan pemerintah Turki menerapkan kebijakan bebas visa terhadap warga negara Indonesia. Sehingga penulis ingin menganalisis alasan serta dinamika yang terjadi dari kerjasama Indonesia dan Turki terkait kebijakan bebas visa tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Decision Making Theory

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan penulis menggunakan teori pembuat keputusan atau *Decision Making Theory*. Menurut penulis teori ini cocok digunakan untuk menganalisa mengapa pada akhir tahun 2021 pemerintah Turki menerapkan kebijakan bebas visa terhadap warga negara Indonesia. Decision making theory merupakan sebuah model untuk menjelaskan mengapa seorang aktor mengambil atau memutuskan sebuah kebijakan khususnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri (*Foreign Decision Making*). Proses pengambilan kebijakan dapat diartikan sebagai suatu langkah yang diambil untuk memilih berbagai alternatif yang ada. Jika suatu negara mengambil sebuah kebijakan tertentu maka perlu dipertanyakan mengapa aktor atau pemimpin negara tersebut mengambil keputusan tersebut.

Menurut William D. Coplin terdapat 3 indikasi utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Coplin 2003):

1. Kondisi politik dalam negeri, kondisi politik dalam suatu negara dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri yang dibuat kata akan diberlakukan oleh negara. Kondisi politik yang dimaksud bisa berupa penolakan atau dukungan dalam pelaksanaan kebijakan

yang nantinya akan mempengaruhi pembuat keputusan untuk mengambil kebijakan luar negeri. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti stabilitas negara, kepribadian pengambil keputusan atau adat masyarakat dalam suatu negara;

2. Situasi ekonomi dan militer domestik, kemampuan ekonomi dan kemampuan militer yang dimiliki oleh suatu negara akan sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri negara tersebut. Faktor ekonomi suatu negara bisa menjadi sebuah tolak ukur dalam kemampuan negara tersebut di kancah internasional. Selain itu faktor militer juga berperan penting dalam pengambilan kebijakan. Semakin besar anggaran ekonomi yang dianggarkan untuk militer suatu negara akan berpengaruh besar terhadap kemampuan negara dalam mempertimbangkan pertahanan serta keamanan negara;

3. Situasi dan kondisi internasional, sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dengan kondisi yang ada akan mempengaruhi hubungan suatu negara serta bagaimana negara dalam membuat sebuah kebijakan. Dalam lingkup internasional setiap negara memiliki kedaulatan atau wilayah yang dikuasai dalam artian tidak dapat diganggu dan pastinya mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dibuat.

Namun dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa kondisi militer tidak relevan untuk digunakan karena pembahasan terfokus kepada konteks ekonomi dalam negeri.

Ketiga faktor di atas mempunyai peran yang sangat penting dan saling berkesinambungan satu sama lain dalam pengaruhnya terhadap pertimbangan pembuat kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan. Lebih lanjut dalam bukunya William D. Coplin menjelaskan terdapat *Policy Influencer* yaitu aktor yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Terdapat 4 kategori Policy Influencer :

1. *Bureaucratic Influencer* (Anggota Birokrat) yaitu dapat berupa individu atau organisasi yang ada di dalam pemerintahan yang membantu para pembuat keputusan dalam mempertimbangkan dan mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Policy influencer ini dapat memberikan informasi secara langsung kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil sebuah kebijakan sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang telah diputuskan.

2. *Partisan Influencer* (partai yang mempengaruhi), sebuah kelompok yang menerima tuntutan-tuntutan politis dari masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah. Mereka harus mampu menekan pemerintahan untuk mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat.

3. *Interest Influencer*, yaitu sekelompok individu yang bergabung dalam sebuah lingkup yang memiliki kepentingan sama terkait dengan pengambilan kebijakan luar negeri. Mereka memiliki beberapa metode yang digunakan dalam mempengaruhi para pembuat kebijakan seperti menulis surat kepada pembuat kebijakan, memberikan dukungan bahkan ancaman kepada para pembuat kebijakan

4. *Mass Influencer*, Policy Influencer ini memiliki tipe yang terwujud melalui opini publik yang tertuang pada sebuah media massa. Opini yang diberikan oleh mass influencer biasanya dijadikan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merasionalisasikan kebijakan luar negerinya.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara penulis dalam menganalisis faktor Turki menerapkan kebijakan bebas visa kepada warga negara Indonesia adalah dari kedekatan hubungan antara pemerintah Turki dan Indonesia. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Turki melalui *decision making theory* dalam meningkatkan perekonomian dan sektor pariwisata merupakan upaya untuk meminimalisir dampak yang lebih luas di tengah pandemi covid-19. Ekonomi yang menjadi salah satu fokus Presiden Erdogan selama memimpin dan dilihat dari sektor pariwisata Turki memiliki potensi yang besar jika kebijakan bebas visa diterapkan. Kebijakan tersebut juga ditimbang dari kemungkinan potensi warga negara Indonesia yang akan melancong ke negara mereka untuk sekedar menjalani liburan atau kegiatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari potensi wisatawan asal Indonesia yang berlibur ke Turki dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu dengan penerapan kebijakan bebas visa terhadap Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antara Turki dan Indonesia di berbagai bidang selain ekonomi dan pariwisata seperti pendidikan, militer, sosial budaya, dan lain-lain.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian kualitatif melalui penjelasan data-data yang didapat dari tulisan dan karya ilmiah. Dari hasil analisis data yang sudah ada menghasilkan penelitian deskriptif yang dapat menghasilkan solusi serta dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan (Thabrani 2021).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam proposal skripsi ini adalah Turki sebagai aktor yang melaksanakan dan memberlakukan kebijakan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan kebijakan bebas visa yang diterapkan pada akhir tahun 2021.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Data yang diperoleh oleh penulis dalam proposal skripsi ini didapatkan melalui jurnal artikel, dokumen resmi, website, dan media online yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu kepentingan kerjasama Indonesia-Turki dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata studi kasus penerapan kebijakan bebas visa 2021.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian skripsi ini melalui pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang tertuju pada jurnal, artikel, serta sumber lainnya yang sesuai dengan teori yang digunakan. Data yang sudah terkumpul melalui pelbagai sumber tersebut disaring kembali untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari penelitian. Setelah penyaringan tersebut tahapan yang dilalui adalah proses pengembangan pemahaman terkait masalah utama yang akan diteliti dilihat dari tinjauan pustaka serta penelusuran dan pengumpulan pada sumber yang sesuai dan terpercaya serta menulis laporan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menganalisis mengapa Turki menerapkan kebijakan bebas visa kepada Indonesia. Bab I penelitian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada Bab II berisi tentang pembahasan mengenai kajian dan sumber yang tentunya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Data-data tersebut diantaranya adalah tentang bagaimana kebijakan politik luar negeri Turki, sejarah politik luar negeri Turki, serta sejarah hubungan antara Turki dan Indonesia. Kemudian dalam Bab III penulis akan memaparkan hasil analisis yang sudah dilakukan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang Turki menerapkan kebijakan bebas visa kepada Indonesia melalui pendekatan Decision Making Theory. Selain itu, penulis juga mengkaji keterkaitan variabel kasus dengan konsep teori yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Dan untuk yang terakhir adalah bab IV sebagai penutup dari keseluruhan penelitian dengan menyampaikan hasil dari inti penelitian yang mencakup kesimpulan akhir.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI

2.1 Politik Luar Negeri Turki Era Presiden Erdogan

Memasuki masa kepemimpinan Presiden Erdogan muncul pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam kebijakan politik luar negerinya. Pendekatan itu sering disebut dengan Doktrin Davutoglu. Doktrin tersebut memiliki kaitan erat dengan gerakan Neo-Ottomanisme yang digagas oleh Ahmet Davutoglu yaitu Menteri Luar Negeri Turki saat ini. Doktrin tersebut tertuang dalam buku *Strategic Depth* karangan Davutoglu yang menyatakan bahwa Turki mempunyai letak yang sangat strategis secara geografis dan memiliki kekayaan warisan sejarah Kerajaan Turki Utsmani sehingga ia menganggap bahwa Turki semestinya turut andil dalam meningkatkan peran serta memberikan pengaruh di kancah internasional terutama kepada negara-negara yang dianggap sebagai bekas wilayah Kerajaan Turki Utsmani. Davutoglu juga mengungkapkan bahwa Turki memiliki potensi besar untuk kembali menjadi negara muslim yang super power seperti zaman Kerajaan Turki Utsmani. Gagasan tersebut diimplementasikan oleh Davutoglu selama menjadi Menteri Luar Negeri Turki dengan membuat visi yang disesuaikan dengan projek kebijakan luar negeri seperti kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah (Fericandra 2016).

Kebijakan luar negeri Turki di bawah kepemimpinan Erdogan tidak luput dari peran Profesor Ahmet Davutoglu yang mendorong peningkatan peran politik luar negeri Turki sebagai pemersatu Asia dan Eropa serta menyatukan pendekatan Barat dengan Islam. Melalui pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Turki memberikan dampak terhadap potensi *soft power* karena dalam pelaksanaannya bertujuan untuk memperkuat regional dan mengharuskan Turki untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain sehingga menciptakan

mitra yang strategis dan seimbang sesuai dengan visi dari kebijakan luar negeri serta memberikan pengaruh secara global. Di bawah Erdogan, Turki memiliki prinsip dalam kebijakan luar negerinya. Mereka (Turki) memantapkan diri sebagai aktor rasional yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan lain-lain. Terdapat dua prinsip utama terhadap kebijakan luar negeri Turki, yaitu: *pertama*, pandangan strategis yang mendorong Turki untuk memperkuat diplomasi yang pro-aktif dengan tujuan menghasilkan kesejahteraan, menjaga stabilitas keamanan negara-negara tetangga, berupaya untuk menghentikan kemiskinan, serta menyelesaikan konflik-konflik di beberapa kawasan dengan tujuan kesejahteraan dan perdamaian. *Kedua*, Turki menggunakan identitas secara letak geografi yang sangat strategis seperti adanya budaya dan sejarah yang unik sebagai patokan politik luar negeri Turki sehingga membuat Turki mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian di kawasan sekitar dan global (Triyansyah 2019).

Pada awal kepemimpinan Erdogan berada di antara pertentangan kekuatan masa lalu dan upaya perbaikan saat ini. Namun, Erdogan berani menerapkan sistem atau konsep islamisme di tengah tersebarnya paham sekularisme di Turki yang masih kental saat itu. Pergerakan Erdogan dalam memimpin tidak lepas dari latar belakang pendidikannya yang memiliki kaitan erat dengan Islam konservatif sehingga ia menumbuhkan karakter dan menerapkan implementasi islamisme saat menjadi presiden. Secara perlahan Turki kembali bangkit di bawah kepemimpinan Erdogan yang terus membangun hubungan ekonomi dan persaudaraan dengan negara lain khususnya dengan negara-negara tetangga sehingga hal tersebut menunjukkan fenomena kebangkitan Neo-Ottomanisme. Konsep yang digagas oleh Davutoglu sebagai Menteri Luar Negeri Turki sekaligus sebagai penasehat eksekutif dianggap mampu mendorong semangat keislaman seperti pada zaman kerajaan Turki Utsmani. Dalam pandangan politik, Turki tidak

ingin dianggap remeh oleh negara-negara Barat. Hal tersebut sesuai dengan adanya implementasi dari gagasan yang mengharuskan Turki untuk turut andil di kancah internasional dan tidak hanya menjadi pengikut dari Uni Eropa, NATO, atau Amerika Serikat (Junaidi 2016).

Dinamika politik Turki terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam perkembangannya tersebut muncul peran sentral dari Ahmet Davutoglu yang dianggap sebagai aktor dalam kebijakan luar negeri Turki yang baru. Terlepas dari pro dan kontra terkait kontribusinya dalam politik dan kebijakan luar negeri Turki, Davutoglu berperan penting dalam menguatkan ketajaman strategis Turki terkait arah kebijakan luar negeri. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep dan visi Davutoglu memberikan pengaruh bagi para pengambil kebijakan Turki. Dia juga memberikan penekanan khusus terhadap hubungan Turki dengan negara-negara tetangga agar menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan membantu menyelesaikan masalah atau berkontribusi dalam penyelesaian konflik. Salah satu bukti nyata dari pengaruh doktrin Davutoglu adalah semakin besarnya keterlibatan dan pengaruh Turki dalam mengembangkan hubungan dengan wilayah yang memiliki kaitan masa lalu dengan Kerajaan Turki Utsmani serta berperan aktif di kancah global. Namun implementasi doktrin Davutoglu bukan tanpa masalah. Hal tersebut berkaitan dengan serangkaian peristiwa perang Suriah dan adanya pemberontakan yang terjadi di Arab yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dan daya tarik dari komunitas atau organisasi internasional terhadap peran Turki saat menyelesaikan konflik (Coşkun 2016).

Saat Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri terdapat pengembangan konsep baru dalam kebijakan luar negeri Turki yang dikomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Turki saat itu, Ahmet Davutoglu. Konsep baru tersebut terpusat kepada kedalaman strategis yang berdasarkan dari nilai bangsa Turki dalam politik dunia. Konsep baru ini juga mendorong

munculnya kebijakan luar negeri di era Erdogan termasuk konsep untuk berhubungan baik dengan negara-negara tetangga. Secara garis besar terdapat empat dasar politik luar negeri yang dimiliki Turki pada masa pemerintahan Erdogan, yaitu: *pertama*, nol masalah dengan negara tetangga (*zero problems with neighbors*), konsep ini mendorong Turki untuk menyesuaikan tindakan politik negaranya agar dapat mencapai target yaitu keberhasilan dalam beberapa kemitraan seperti ekonomi, militer dan politik. *Kedua*, Menjangkau wilayah yang berdekatan (*Outreach to adjacent region*) yaitu memperbaiki dan mengembangkan hubungan dengan negara tetangga terdekat Turki seperti Balkan, Kaukasus, Timur Tengah dan Asia Tengah. *Ketiga*, Kebijakan luar negeri yang multidimensi (*multi-dimensional foreign policy*) yaitu prinsip yang dilakukan melalui keterlibatan Turki dalam mengatasi masalah global tanpa menimbulkan sebuah masalah serta dapat menjadi pertimbangan di dalam diplomasi internasional. *Keempat*, Diplomasi berirama (*Rhythmic diplomacy*) yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pertemuan internasional untuk memperkuat hubungan diplomasi antara aktor negara dan aktor non negara (Triyansyah 2019). Dengan adanya doktrin Davutoglu di dalam berjalannya sistem pemerintahan Turki di bawah kepemimpinan Erdogan muncul dampak secara global melalui keterikatan hubungan baik dengan berbagai negara dari wilayah Barat maupun Timur. Selain itu Turki juga mampu menunjukkan kepentingan masyarakat Islam dunia dengan berperan aktif melalui kerjasama yang terus ditingkatkan dan diperbaiki serta membuat kebijakan luar negeri yang pendekatannya bersifat modern dan rasional.

Dalam perjalanan politik dan kebijakan luar negeri Turki, terdapat doktrin realisme moral merupakan sebuah pandangan dalam filsafat etika yang terfokus kepada keyakinan bahwa muncul pandangan yang objektif dengan nilai-nilai moral. Realisme moral tertuju kepada pendekatan nilai-nilai moral yang dianggap penting dan perlu digunakan di luar resepsi manusia

pada umumnya dan menunjukkan kebenaran moral secara objektif termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh Turki dalam beberapa keputusan luar negerinya. Namun, dalam pelaksanaannya realisme moral terdapat perbedaan dari setiap individu ataupun negara yang mencoba menerapkan implementasi karena beragam pandangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Secara umum dalam pelaksanaan politik luar negerinya Turki memiliki kaitan dengan realisme moral, diantaranya: *pertama*, Pengaruh Agama, dalam hal ini Turki mempunyai sejarah yang panjang di bawah pengaruh agama Islam dan nilai-nilai moral yang terkandung selama berdirinya Turki dari era kerajaan hingga menjadi Republik. Pandangan realisme moral dalam hal ini berkaitan dengan pandangan objektif yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. *Kedua*, Budaya dan Nilai-nilai Tradisional, pandangan terhadap nilai-nilai etika dan moral Budaya tradisional menjadi landasan Turki dalam kaitannya dengan moral yang tersebar di masyarakat. *Ketiga*, Pandangan Politik dan Sosial, pendekatan realisme moral tidak lepas dari faktor politik dan sosial. Hal tersebut beriringan dengan kepentingan diskusi terkait kehadiran sosial, hak asasi manusia, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam membentuk cara pandang terhadap nilai-nilai moral yang objektif. *Keempat*, Perspektif Filosofis, poin ini beredar di kalangan filosof dan intelektual di Turki yang memiliki pandangan beragam tentang etika dan realisme moral (Kramer 2017).

Salah satu kasus penerapan Turki menggunakan pendekatan realisme moral adalah keikutsertaan dalam konflik di Libya. Dalam kasus ini Turki berusaha untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara apapun. Pergerakan yang dilakukan oleh Turki memandang bahwa kepentingan negara lebih penting daripada moralitas dan etika politik internasional saat negara berusaha melakukan struggle for power. Keterlibatan Turki dalam konflik Libya memiliki kaitan dengan doktrin Davutoglu yang mendorong Turki untuk terlibat dalam konteks

internasional khususnya dalam menjaga hegemoni kawasan yang berkaitan dengan kekayaan warisan budaya dan sejarah Kerajaan Turki Utsmani. Dalam pelaksanaannya Turki memulai implementasi melalui keterlibatan militer ke Libya bahkan hingga mengirimkan kapal rusak dan Armada kecil ke perairan Yunani yang dianggap sebagai wilayah atau di bawah teritorial Turki. Penerapan doktrin tersebut mendapatkan dukungan dari warga seiring dengan meningkatnya kebangkitan nasionalisme di Turki. Namun terdapat pro dan kontra dalam keterlibatan Turki melalui pendekatan doktrin realisme moral seperti ancaman yang didapatkan dari Rusia ataupun Irak terkait eksploitasi gas alam. Ancaman tersebut tidak lain karena keterlibatan Turki melalui intervensi militer untuk meminimalisir keterlibatan negara lain di bidang energi (Assilmy 2021).

2.2 Kebijakan Luar Negeri Turki di Asia Pasifik

Berdirinya Republik Turki membuka jalan kebijakan luar negeri Turki terhadap kaum kasus dan Asia Tengah terlebih pasca terjadinya perang dingin. Namun Turki mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan kawasan Asia Pasifik karena minimnya pengetahuan serta kedekatan dengan kawasan tersebut. Salah satu Kerjasama yang dilakukan oleh Turki adalah dengan Taiwan yang saat itu berada di bawah bayang-bayang Soviet. Dalam proses kerjasama tersebut para pembuat kebijakan luar negeri Turki merasa prihatin dengan adanya ancaman yang diberikan oleh Soviet melalui keamanan. Di sisi lain Turki memiliki peran penting di kawasan Asia Pasifik karena memiliki letak strategis dan kepentingan nasional. Pergerakan Turki yang aktif juga mendorong pencegahan dalam penyebaran komunisme di wilayah Asia Pasifik, hal tersebut mendapatkan jalan kerjasama dari Barat karena memiliki pemahaman yang sama terkait ancaman Soviet atau penyebaran komunisme. Turki mengalami beberapa perubahan dalam kebijakan luar negeri namun perubahan tersebut dianggap wajar karena secara keseluruhan Turki tidak mengubah kepentingan kebijakan luar negerinya dan terus berada pada konsep yang pro

akan barat untuk tujuan integrasi penuh dengan Barat. Orientasi Turki dalam ekonomi mengharuskan Turki untuk lebih membuka diri untuk kawasan lain dan lingkungan internasional. Hubungan Turki dengan kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu contoh dampak dan kondisi ekonomi terhadap kebijakan luar negeri.

Berkaca dari orientasi ekspor Turki yang mendorong perekonomian sehingga Turki terus membuka kerjasama khususnya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Penerapan kebijakan luar negeri Turki mengalami kepadatan sehingga menyebabkan perkembangan regional terganggu khususnya konflik di Balkan dan Kaukasus. Arah kebijakan luar negeri Turki yang dilatarbelakangi dari adanya doktrin Davutoglu tersusun dalam bentuk visi dan penyediaan kerangka implementasi kebijakan luar negeri yang mana salah satunya dalam implementasi kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah. Fokus utama dari kebijakan luar negeri Turki yang terpapar Neo-Ottomanisme adalah keterlibatan Turki di tengah konflik Israel-Palestina. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan tersebut berdasarkan warisan sejarah Kerajaan Turki Utsmani termasuk di dalamnya wilayah Palestina sebagai bagian dari tanggung jawab kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah. Dalam kasus ini, pemerintah Turki mendukung penuh pembebasan Palestina dari Israel agar mendapatkan pengakuan secara resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di bawah kepemimpinan Erdogan pendekatan melalui doktrin Davutoglu terus dibuktikan dengan pengembangan hubungan yang produktif dengan hampir seluruh negara tetangga dan kerjasama dengan kekuatan global lainnya. Hal tersebut tidak lain karena alasan yang nantinya akan membantu kepentingan Turki di kancah internasional. Kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel mengarah kepada prinsip skeptis yang sudah terjadi sebelum kepemimpinan Presiden Erdogan yaitu pada tahun 1980-an saat Israel meresmikan hukum Yerusalem yang di dalamnya mencatat seluruh wilayah Yerusalem adalah

milik Israel. Hal tersebut mendapatkan respon dari pemerintah Turki dengan melakukan penurunan kerjasama dengan Israel. Kebijakan tersebut tidak lepas dari arah kebijakan luar negeri yang diubah dari sekuler ke arah yang lebih religius dibuktikan dari pidato kemenangan Erdogan sebagai Presiden Turki yang dengan tegas mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi anggota PBB dan kebebasan dari Israel (ILYAS 2018).

Hubungan Turki dengan negara di Asia Pasifik berkaitan dengan prospek ekonomi yang mengacu pada kerjasama sehingga memunculkan pertumbuhan bisnis baru serta membuka hubungan dagang tentara Turki dengan dunia luar. Dalam hal ini kebijakan luar negeri Turki terfokus kepada faktor ekonomi sebagai sebuah kepentingan utama dan menjadi alasan ekspansi Turki di Asia Pasifik. Pada awal dibukanya liberalisasi perekonomian di Turki terjadi ketimpangan karena pengaruh dari sistem politik dan wilayah yang sedikit banyak memberikan dampak terhadap perdagangan Turki. Hal tersebut terjadi pada masa Ozal yang membuat kebijakan untuk kepentingan bisnis sehingga kelompok tertentu dapat memasuki ranah pemerintah dan kebijakan luar negeri. Di bawah pemerintahan Ozal kebijakan luar negeri Turki berfokus kepada kepentingan militer namun mengutamakan faktor ekonomi, selama kebijakan diterapkan muncul peran penting dari aktor bisnis atau aktor non pemerintah dalam hal ini adalah proses pembuatan keputusan. Beriringan dengan munculnya peran penting dari aktor-aktor tersebut Turki terus berupaya untuk meningkatkan perdagangan dan membangun kerjasama ekonomi dengan wilayah baru (YOON 2019).

Dalam upaya peningkatan volume perdagangan Turki memperluas negosiasi dan kerjasama dengan negara-negara di Asia Pasifik seperti Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Upaya tersebut selaras dengan orientasi kebijakan luar negeri Turki yang terfokus pada ekonomi sehingga memunculkan pesan bahwa Turki melakukan pendekatan

soft power pada negara-negara tersebut sehingga harapannya mendapatkan dukungan dari pergerakan ekonomi yang sedang di jalankan. Setelah melakukan perjanjian dan kerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik terjadi peningkatan volume perdagangan liturgi yang terus tumbuh dari kisaran tahun 2000 hingga 2003. Meskipun pada awal tahun 2000-an volume tersebut belum naik secara signifikan namun tujuan awal dari ekspansi Turki ke wilayah Asia Pasifik cukup jelas terkait upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi khususnya perdagangan. Secara umum Kementerian Luar Negeri Turki menerima gambaran Asia Pasifik terkait kemitraan strategis yang dikhususkan kepada 6 negara di kawasan tersebut yaitu Cina, Jepang, Indonesia, Korea, Malaysia, dan Singapura. Pendekatan yang dilakukan oleh Turki kepada negara kawasan Asia Pasifik tidak lain karena keberhasilan ekonomi negara-negara regional meskipun terdapat pertimbangan dalam kerjasama yang dilakukan namun hubungan dengan negara-negara tersebut tetap dijalankan sesuai dengan kebijakan luar negeri dan tujuan awal yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan sektor perdagangan Turki (YOON 2019).

Munculnya animo Turki untuk melakukan pendekatan dengan negara Kawasan Asia Tenggara adalah terkait latar belakang agama atau isu-isu keagamaan. Selain itu kedekatan Turki dengan negara-negara Asia Tenggara berkaitan dengan konteks Pendidikan, dibuktikan dengan pemberian beasiswa ke Turki kepada mahasiswa yang melanjutkan studi. Keterlibatan aktor pendidikan dalam hal ini adalah pihak akademik (universitas) memberikan pengaruh dalam hubungan Turki dengan negara-negara Kawasan Asia Tenggara. Turki melihat adanya keistimewaan di wilayah atau kawasan Asia tenggara yang dalam perjalanan kerjasamanya terdapat pertukaran budaya dan adanya saling kontribusi dalam penyelesaian masalah khususnya yang berkaitan dengan konteks keagamaan. Keikutsertaan Turki dalam menyelesaikan masalah keagamaan menjadi salah satu bukti bahwa kepentingan Turki di kawasan ini tidak hanya

terfokus kepada bidang ekonomi saja melainkan. Pada tanggal 8 Agustus 2016 Turki mengumumkan kebijakan baru yaitu "Asia anew" yang menyebutkan bahwa Turki mungkin negaranya sebagai jembatan antara timur dan barat dengan letak geografisnya dan kedudukan peran serta kegiatannya. Turki menganggap bahwa Asia tidak lagi menjadi bagian luar dari kebijakan luar negerinya bahkan dalam hal ini Asia menjadi pusat kebijakan untuk terus mengembangkan kerjasama sehingga menguatkan posisi kebijakan Turki dan Asia Pasifik. Pendekatan yang dilakukan oleh Turki dalam peningkatan ekonomi dan sektor perdagangan dengan negara Asia Pasifik menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Turki serta strategi untuk meningkatkan kerjasama regional dengan kawasan Asia Pasifik. Dengan begitu pendekatan soft power menjadi daya tarik tersendiri bagi Turki untuk membuat pihak lain menginginkan kerjasama secara diplomasi dengan Turki (YOON 2019).

2.3 Hubungan Bilateral Turki-Indonesia

2.3.1 Era Sukarno

17 Agustus 1945 menjadi hari kemerdekaan Indonesia yang sangat berkesan. Bukan hanya bagi rakyat Indonesia pada umumnya namun menjadi bagian dari bangsa Turki yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia dan kebebasan dari penjajahan. Pasca kemerdekaan presiden Soekarno mengunjungi Turki pada 24 April 1958. Kunjungan tersebut memberikan kesan baik dan mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat Turki sebagai bentuk hubungan baik antara Indonesia dan Turki yang saat itu dipimpin Perdana Menteri Adnan Menderes. Kunjungan tersebut menjadi kunjungan pertama yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke Turki. Dalam perjalanan kunjungannya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pendiri Republik Turki yaitu Mustafa Kemal menjadi salah satu inspirasi dalam merumuskan pandangan dan gagasan terkait agama dan negara. Kunjungan tersebut juga ditandai

sebagai awal perjalanan diplomatik Turki dan Indonesia yang sebelumnya sudah terjalin pada masa kerajaan Turki Utsmani (Rahmad fauzan 2021). Perdana Menteri Turki saat itu Adnan Menderes juga berupaya untuk membangun hubungan baik dengan dunia Islam yang salah satunya melalui Indonesia. Kunjungan Soekarno pada tahun tersebut juga mendorong kembali hubungan baik antara Turki dan Indonesia, selain itu kedatangannya juga untuk penyambutan serta pemberian anugerah kewarganegaraan kehormatan dari pemerintah Ankara kepada Presiden Indonesia. Meskipun hubungan antara Turki dan Indonesia pada era Presiden Soekarno tidak sekuat atau terlalu terikat seperti dengan negara lain, namun Turki dan Indonesia memiliki perspektif yang sama dalam konsep kemerdekaan, kedaulatan nasional penentangan terhadap adanya kolonialisme dan imperialisme. Kesamaan perspektif tersebut merupakan cerminan dari gerakan non-blok serta upaya untuk membangun kerjasama dengan negara-negara lain pasca usainya perang dingin (Azzam 2020).

2.3.2 Era Suharto

Pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto hubungan antara Turki dan Indonesia terus dikembangkan dan dilanjutkan dengan beberapa kerjasama. Meskipun pada hakikatnya Soeharto lebih mengutamakan diplomasi melalui normalisasi hubungan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Pada masa Presiden Soeharto Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama ekonomi yang berujung pada peningkatan perdagangan dan investasi bilateral termasuk di dalamnya perdagangan barang dan jasa. Selain itu kerjasama budaya dan pendidikan juga dilakukan melalui pertukaran budaya dan pelajar serta memperkuat pemahaman di tengah masyarakat. Dari segi politik Turki dan Indonesia tergabung ke dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan bekerja sama di berbagai forum internasional termasuk PBB. Turki Indonesia juga memiliki fisik

kebijakan luar negeri yang hampir sama sehingga kedua negara turut serta dalam menangani isu global terutama tentang kebijakan luar negeri, perdamaian, dan isu kemanusiaan.

2.3.3 Masa Reformasi

Masa reformasi diawali dari kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Dinamika Kerjasama yang dilakukan dengan Turki berdampak dari terbentuknya Development Eight atau kelompok D8 yang di dalamnya terdapat peran besar Presiden Habibie bersama Perdana Menteri Turki saat itu Necmettin Erbakan. D8 sendiri didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang disepakati pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 1997 yang berisi 8 negara berkembang yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Awal berdirinya D8 bertujuan untuk menyatukan kekuatan negara-negara Islam anggota dari Organisasi Kerjasama Islam untuk melawan ketidakadilan dan sikap pilih kasih negara-negara Barat dalam penerapan kerjasama ekonomi global. Komitmen yang disepakati dan dijalankan antara anggota D8 terus berjalan hingga saat ini sehingga kerjasama yang dibangun pada saat itu terus dikembangkan melalui kerjasama kerjasama baru di berbagai bidang yang melibatkan negara-negara anggota (INDONESIA 2022).

Tabel 1.1 Hubungan Turki dan Indonesia

No	Tahun	Peristiwa
1	Abad ke-16	Hubungan kerjasama Turki Usmani dengan kerajaan Aceh Indonesia
2	1958	Hubungan Turki dan Indonesia Kembali berlanjut secara diplomasi
3	1985	Indonesia secara resmi membuka Konsulat Jenderal Kehormatan di Istanbul
4	2017	Kunjungan balasan presiden RI Joko Widodo sekaligus peresmian perjanjian IT-CEPA di Ankara, Turki
5	2018	Peluncuran medium tank “Harimau” sebagai salah satu bukti kerjasama Turki dan Indonesia
6	2021	Pemerintah Turki melalui presiden Erdogan secara resmi memberlakukan kebijakan bebas visa kepada WNI

2.3.4 Kebijakan Bebas Visa Turki terhadap Indonesia

Turki dan Indonesia memiliki kesamaan sebagai negara dengan mayoritas umat muslim di dalamnya. Faktor kesamaan ini juga mendorong pemberlakuan kebijakan bebas visa Turki terhadap Indonesia. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam maka membuka peluang bagi Turki untuk mempromosikan wisata halal di negaranya. Ketika masa pandemi beberapa negara mengalami penurunan dalam jumlah wisatawan karena dampak dari covid-19, namun tidak dengan Turki yang mengalami peningkatan di sektor pariwisata. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Organisasi Pariwisata Internasional Halal Turki yaitu Emrullah Ahmad Turhan yang menyatakan bahwa peningkatan tersebut berkat peran promosi yang baik serta tindakan yang tepat dalam meminimalisir dampak covid-19 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki. Bersamaan dengan hal itu mereka meluncurkan program "Sertifikasi Pariwisata Aman" yang bertujuan memberikan perjalanan dan fasilitas tambahan seperti kesehatan. Program tersebut sengaja dibuat oleh pemerintah Turki untuk menyiapkan kedatangan wisatawan asing serta sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kegiatan pariwisata selama pandemi covid-19 (Andriani 2021).

Pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan Turki kepada Indonesia tidak lepas dari banyaknya wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke Turki untuk memanfaatkan waktu liburan mereka. Sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penting pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan yang diberikan oleh Turki. Dan karena itu Turki menjadi salah satu negara di dunia yang berani memberlakukan kebijakan bebas visa pada saat pandemi covid-19 belum berakhir. Hal ini dilakukan oleh Turki untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan menikmati pariwisata yang ada di negaranya. Perpaduan benua Asia dan benua Eropa juga

menjadikan Turki sebagai tujuan wisata yang memiliki berbagai macam keindahan alam serta kolaborasi budaya modern dan tradisional sehingga wisatawan akan dibuat kagum dengan keunikan yang disuguhkan di Turki. Selain itu, Turki dipilih oleh kebanyakan wisatawan karena dianggap memiliki tarif yang lebih murah daripada wilayah Eropa yang lain. Hal ini dibuktikan dengan tiket penerbangan yang lebih murah. Diantara tempat wisata yang populer di Turki saat ini adalah wisata balon udara panas di Cappadocia yang menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang sedang berkunjung (Maharani 2021).

Pada masa pandemi covid-19 yang menimpa hampir seluruh negara di dunia, banyak negara yang berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya dan Turki menjadi salah satu diantara negara-negara tersebut. Kebijakan bebas visa yang diberikan Turki kepada Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menarik wisatawan dari Indonesia agar berkunjung ke Turki. Terdapat upaya lain yang dilakukan oleh Turki pada masa pandemi yaitu dengan menerapkan sistem wisata virtual. Dalam pelaksanaan wisata virtual Turki menunjukkan kebudayaan dan sejarah melalui museum, istana, sampai gereja yang ada di sana. Turki juga menyuguhkan tempat-tempat wisata yang indah dan dapat menarik wisatawan seperti kota Istanbul, Antalya, Mugla dan Cappadocia. Pada awal penggunaan wisata virtual ditunjukkan sebagai sarana untuk mempromosikan tempat wisata kepada wisatawan, dengan munculnya covid-19 tempat-tempat wisata menjadi terbatas. Namun keberadaan wisata virtual menjadi solusi dan alternatif untuk menghilangkan kekecewaan karena tidak bisa berwisata secara langsung. Adanya wisata virtual yang diberlakukan di beberapa negara selain Turki memberikan dampak positif untuk menekan penyebaran covid-19. Keuntungan lain yang didapatkan dari penggunaan wisata virtual adalah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sehingga tidak terbatas ruang, jarak dan waktu. Selain itu biaya yang digunakan juga lebih murah tanpa harus datang secara langsung ke destinasi

wisata yang dituju karena cukup melalui platform yang menyediakan tempat wisata (Tutut Herawan 2023).

Kebijakan bebas visa yang diberikan oleh Turki kepada Indonesia tidak lepas dari peran Erdogan sebagai presiden Turki saat ini. Upaya yang sama juga pernah dilakukan oleh Erdogan ketika menjadi perdana menteri Turki dan berfokus kepada peningkatan sektor pariwisata. Hal tersebut terbukti dari catatan *European Regional Development Fund (ERDF)* yang menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Turki dan berhasil meningkatkan devisa negara Turki kurang lebih sebesar 54%. Kebijakan tersebut menjadi instrumen utama yang dimiliki oleh Turki untuk dapat bersaing dengan negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan UEA. Peluncuran kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap pemerintah Turki terlebih secara geografis letak Turki cukup strategis yaitu berada diantara benua Eropa dan Asia dan bisa menjadi kunci untuk membuka kerjasama dengan negara lain khususnya Indonesia (Wicaksono 2021). Selama pelaksanaan kebijakan Turki tidak hanya berfokus kepada ekonomi saja melainkan menyesuaikan dengan tiga hal utama pariwisata menurut World Tourism Organization yaitu *visitor*, *tourist*, dan *excursionist*. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan budaya serta peluang untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Langkah-langkah di atas menjadi bukti penting bagi pemerintahan Erdogan untuk meningkatkan perekonomian negara khususnya di sektor pariwisata.

Penerapan kebijakan bebas visa pernah dilakukan di Indonesia dan mengalami beberapa perbaikan. Terakhir melalui peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa terhadap keamanan negara dan kesejahteraan dalam perspektif keimigrasian. Pemberlakuan peraturan presiden tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia. Secara umum dampak positif yang dihasilkan dari pemberlakuan peraturan presiden adalah peningkatan dari

sektor pariwisata khususnya dalam jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia serta peningkatan ekonomi sehingga dampak positif pula terhadap devisa negara. Selain itu dampak negatif yang dihasilkan dari pemberlakuan peraturan presiden tersebut adalah penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh warga negara asing yang tidak bertanggung jawab seperti menyalahgunakan visa sehingga melewati batas waktu kunjungan atau keluar masuknya tenaga kerja asing secara ilegal yang berdampak terhadap kedaulatan negara. Mudahnya keluar masuk warga negara asing dalam penerapan kebijakan bebas visa disinyalir juga sebagai momen penyebaran narkoba sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam penerapan kebijakan yang sudah ada (Elvira Belinda Mantiri 2021).

Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh Indonesia melalui peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 memiliki tujuan beragam. Selain itu terdapat kelebihan dan kekurangan dari adanya kebijakan yang diterapkan. Sektor pariwisata menjadi bagian yang diuntungkan bagi Indonesia saat pemberlakuan bebas visa kunjungan terlebih dalam upaya peningkatan devisa negara. Sektor pariwisata di Indonesia juga memiliki peluang yang cukup besar karena besarnya wilayah dan luasnya potensi pariwisata di Indonesia. Pengaruh positif yang dihasilkan dari pariwisata adalah peningkatan pemasukan negara, perluasan relasi kerja masyarakat yang berada di daerah, serta memicu pertumbuhan industri yang berada di daerah pariwisata. Secara garis besar keuntungan didapatkan dari meningkatnya perekonomian bagi warga khususnya di daerah wisata. Sedangkan dampak negatif yang muncul dalam penerapan kebijakan bebas visa adalah lemahnya pengawasan terhadap keluar masuknya warga negara asing (Yoni Basyir Wira 2021).

Memasuki periode covid-19 kebijakan bebas visa sementara diberhentikan untuk mencari solusi dan memperbaiki kebijakan dalam peraturan presiden nomor 21 tahun 2016. Evaluasi

yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan manfaat yang lebih maksimal dari penerapan kebijakan bebas visa. Kebijakan bebas visa yang diberlakukan merupakan bagian dari implementasi di bidang keimigrasian yang bertujuan memberikan kemudahan terhadap warga negara asing untuk memasuki suatu negara atau wilayah tertentu. Berdasarkan data dari Kementerian pariwisata dan Ekonomi kreatif kebijakan bebas visa yang diterapkan memiliki dampak positif terutama dalam peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Meskipun demikian penularan covid-19 pada masa pandemi yang terus meningkat menyebabkan pembatasan pada kegiatan masyarakat nasional dan internasional sehingga perlu adanya pemberhentian sementara untuk meminimalisir penyebaran yang terjadi pada kasus covid-19 (Anak Agung Gede Dwira Hadi Santosa 2022).

Munculnya indikasi kejahatan dari penerapan kebijakan bebas visa yang sudah diterapkan menjadikan Indonesia lebih waspada khususnya terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal. Selain itu pemberlakuan kebijakan bebas visa juga diambil dari asas kebermanfaatannya yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia yang terus berupaya dalam meningkatkan ekonomi khususnya dari sektor pariwisata. Dari hasil evaluasi yang telah diteliti disebutkan bahwa keamanan juga menjadi faktor penting untuk menjaga fasilitas yang sudah diterapkan oleh negara sehingga pemerintah selalu waspada terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan yang telah dibuat untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Secara umum pemberian kebijakan bebas visa sangat efektif dilihat dari segi peningkatan pada sektor ekonomi dan pariwisata. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan awal diberlakukannya kebijakan bebas visa yang dibuktikan dengan peningkatan wisatawan asing dari tahun ke tahun (Nurul Pratiwi 2021).

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP INDONESIA

3.1 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Turki

3.1.1 Kondisi Domestik Turki

Pada bab 3 penulis akan membahas alasan utama yang menjadi latar belakang Turki menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap Indonesia pada tahun 2021 melalui pendekatan Decision Making Theory. Sebelumnya telah dijelaskan terdapat tiga faktor dominan yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Di bagian ini penulis akan mengkolaborasikan faktor pertama yaitu kondisi domestik negara Turki dalam memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap Indonesia. Situasi domestik Turki saat itu meliputi kondisi perekonomian yang berkaitan dengan utang luar negeri, inflasi, dan tingkat pengangguran, terlebih ketika memasuki covid-19 terjadi perlambatan ekonomi hingga Turki kehilangan hampir 15% nilai mata uangnya. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan presiden Erdogan berupaya agar pengelolaan krisis dapat diatasi khususnya dalam penanganan covid-19 melalui beberapa kebijakan yang dibuatnya (Aksoy 2020).

Kelompok kerja hubungan bilateral Turki Indonesia juga berpengaruh dalam penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Turki terhadap Indonesia. Terdapat peran Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI yang menyambut kunjungan parlemen Turki dalam rentetan kegiatan "ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)" di Jakarta. Pertolongan tersebut menunjukkan hubungan yang baik antara Turki dan Indonesia tanpa dibatasi perjanjian atau kesepakatan antara kedua negara namun lebih dekat lagi secara emosional bahkan antara

masyarakat Indonesia dan masyarakat Turki (DPR-RI 2023). Kondisi domestik Turki juga dipengaruhi oleh peran policy influencer. Hal tersebut berkaitan dengan kedekatan aktor-aktor negara maupun aktor non negara antara Turki dan Indonesia. Salah satunya adalah kedekatan personal Presiden Joko Widodo dengan Presiden Erdogan. Melalui kunjungan balasan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 yang menjadi indikasi awal keinginan Turki untuk menerapkan kebijakan terhadap Indonesia yang sesuai dengan kepentingan nasional negaranya. Selain itu, terdapat peran dari aktor bisnis dalam penerapan kebijakan luar negeri Turki namun dalam hal ini para aktor bisnis berada di bawah naungan kebijakan luar negeri sehingga lebih tertuju kepada pengaruh dari pihak birokrat pemerintahan Turki. Kemudian peran dari *Adelet ve Kalkinma Partisi* (AKP) sebagai partai yang dipimpin oleh Erdogan juga mempengaruhi keputusan Erdogan dalam membuat sebuah kebijakan. Peran tersebut terbukti dari beberapa keikutsertaan partai ini dalam konteks internasional seperti mengatasi konflik perdamaian serta upaya mendukung Palestina di bawah bayang-bayang Israel (Damarjati 2015).

Presiden Turki saat itu Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang (UU) Turki tentang Orang Asing dan Perlindungan Internasional nomor 6438. Mengingat bahwa Indonesia dan Turki memiliki hubungan yang baik secara diplomasi dan memiliki kesamaan dalam mayoritas penduduk muslim di negaranya membuat masyarakat Turki memberikan respon positif dalam penerapan kebijakan bebas visa kunjungan yang diberikan pemerintah Turki terhadap Indonesia. Respon positif yang muncul dari masyarakat Turki dihasilkan dari adanya peningkatan di sektor ekonomi dan pariwisata meskipun negara terkena dampak dari pandemi covid-19. Penerapan kebijakan yang baik dari pemerintah juga menguntungkan masyarakat Turki secara umum. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase pemesanan hotel dan villa yang mencapai 100% (Erina 2020).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Turki melalui presiden mereka Rəcəp Tayyep Erdogan pada akhir tahun 2021 merupakan sebuah ide untuk mendorong pergerakan di sektor pariwisata dan bertujuan meningkatkan perekonomian negara. Erdogan menganggap bahwa kebijakan yang dibuat mampu mendorong aktivitas kegiatan pariwisata di negaranya dan meningkatkan perekonomian. Maka dari itu, di masa pemerintahan Erdogan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang penting untuk memicu pergerakan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Erdogan tidak lepas dari potensi Turki di sektor pariwisata. Banyak tawaran pariwisata yang dapat disuguhkan oleh Turki mulai dari wisata budaya, wisata alam, dan masih banyak lagi. Munculnya kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh Turki kepada Indonesia merupakan kebijakan yang tidak buruk. Hal ini dikarenakan potensi yang dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut adalah meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata. Meskipun saat itu pandemi covid-19 belum berakhir, namun dari data yang dimuat menyebutkan bahwa Turki justru mengalami peningkatan yang dihasilkan dari penerapan kebijakan yang telah dibuat (Hans Michael Ehl 2010).

Ketika Turki secara resmi meluncurkan kebijakan bebas visa terhadap warga negara Indonesia (WNI) pada 21 Desember 2021, banyak respon positif dari masyarakat maupun dari lingkungan pemerintahan Turki. Hal ini terkait kebijakan yang diambil tersebut merupakan langkah berani yang dilakukan oleh pemerintah Turki untuk meningkatkan perekonomian dan sektor pariwisata di tengah pandemi covid-19. Dalam konteks penerapan kebijakan bebas visa terhadap warga negara Indonesia, pemerintah Turki menganggap bahwa kebijakan ini merupakan upaya yang selaras dengan kebijakan pariwisata yang pernah dibuat sebagai tulang punggung ekonomi Turki. Persiapan melalui program sertifikat kesehatan juga dilakukan oleh pemerintah Turki untuk mencegah risiko penularan virus terbukti dari rendahnya wisatawan

yang terkena dampak dari covid-19 dengan persentase kurang dari 0,01% dari seluruh wisatawan yang datang ke Turki. Dengan penerapan kebijakan yang baik memunculkan citra positif di mata masyarakat internasional terhadap pemerintah Turki sehingga membuat mereka yakin untuk datang ke Turki tanpa rasa cemas (Musyaffa 2020).

3.1.2 Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer di suatu negara perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan atau menentukan sikap suatu negara. Kondisi ekonomi dan militer suatu negara juga sering dikaitkan dengan kemampuan negara dalam mempertahankan keamanannya dari kemungkinan adanya ancaman yang muncul dari luar maupun dari dalam negara. Namun dalam penelitian ini, konteks militer tidak relevan untuk digunakan karena Turki lebih terfokus kepada peningkatan sektor perekonomian. Seperti yang telah dijelaskan oleh William D.Coplin bahwa kemampuan ekonomi suatu negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri dari negara tersebut. Coplin juga menyebutkan bahwa terdapat dua kriteria untuk melihat bagaimana perekonomian di suatu negara adalah (1) dengan melihat kapasitas produksi barang dan jasa negara tersebut dan (2) ketergantungan negara terhadap perdagangan internasional (Coplin 2003). Sama halnya dengan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Turki dan Indonesia. Perekonomian di Turki sangat bergantung kepada pergerakan sektor pariwisata sehingga pemerintah terus berupaya untuk mendorong aktifitas di dalamnya dengan tujuan memberikan jasa dan pelayanan yang baik khususnya kepada wisatawan sehingga mampu mewujudkan peningkatan di sektor ekonomi.

Hubungan kerjasama antara Turki dan Indonesia memiliki tujuan yang positif dalam kepentingan nasional masing-masing negara. Turki sebagai pintu bagi Indonesia untuk pergi perah di kawasan Asia Barat dan Eropa sedangkan Indonesia memiliki kedudukan yang strategis

di wilayah ASEAN sehingga dapat dimanfaatkan oleh Turki. Kerjasama antara Turki dan Indonesia di sektor perdagangan termuat dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua negara yaitu *Comprehensif Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Perjanjian yang dibuat terkait perdagangan jasa dan barang serta memiliki tujuan untuk mengembangkan inovasi yang menguntungkan bagi Turki dan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, CEPA berada dalam tiga fokus utama yaitu akses pasar, pengembangan kapasitas, serta fasilitas perdagangan dan investasi, baik dilakukan secara bilateral ataupun melalui kerjasama ekonomi regional. Sedangkan *Partnership agreement* yang disepakati oleh Turki dan Indonesia memiliki tujuan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran dalam ranah hukum negara. Selain itu perjanjian dibuat secara tertulis untuk membagi tugas yang perlu diselesaikan oleh masing-masing negara dan memasukkan informasi yang diperlukan sehingga membantu proses penyelesaian jika nantinya terjadi sebuah masalah (Dityo 2020).

Hubungan baik antara pemerintah Turki dan Indonesia meningkatkan minat wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Turki terlebih dalam hal pariwisata Turki memiliki destinasi yang cukup banyak dan layak untuk dijadikan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata. Tercatat pada tahun 2017 jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Turki mencapai 85.000 orang, jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut dibuktikan melalui data dari Kementerian Pariwisata Turki yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan penyumbang wisatawan asing terbesar bagi Turki di tahun 2017. Kementerian pariwisata Turki juga mencatat adanya kenaikan sebesar 70% dari pemesanan biro perjalanan asing dari wisatawan Indonesia yang ingin melancong ke Turki. Meskipun saat itu belum muncul kebijakan bebas visa bagi Indonesia, namun wisatawan asal Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Turki nantinya untuk

menerapkan kebijakan yang sesuai dan diperlukan. Meningkatnya jumlah wisatawan asing pada 2017 memberikan keuntungan di sektor pariwisata sehingga Turki mendapatkan pemasukan devisa negara sebesar US\$26 miliar atau mencapai Rp348 triliun (Asean 2018).

Dalam sektor perdagangan Turki dan Indonesia sama-sama memiliki peran penting sebagai mitra dagang. Indonesia membutuhkan Turki sebagai sarana untuk mengembangkan produk *Crude Palm Oil* (CPO) di wilayah Asia Tengah dan Eropa sebagai pengganti kayu dan karet. Kerjasama dengan Turki ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengeksport produknya di Turki dan negara-negara Balkan. Untuk meminimalisir konflik yang terjadi dan mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan maka Turki dan Indonesia memutuskan memilih *Join Partnership* daripada *Free Trade Area* (FTA). Hal ini dilakukan untuk menjaga neraca perdagangan serta upaya untuk meningkatkan volume perdagangan. Dengan komitmen yang dibuat antara pemerintah Turki dan Indonesia memunculkan peningkatan pertumbuhan perdagangan dari kedua negara (Pujiyono 2016). Sebagai negara yang memiliki hubungan baik secara bilateral Indonesia dan Turki terus memperkuat hubungan tersebut melalui kerjasama di pelbagai sektor. Sejarah mencatatkan bahwasanya Indonesia dan Turki mencapai kesepakatan di sektor perdagangan pada tahun 2015 dengan penandatanganan Delapan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Berjalannya Kerjasama di atas tidak hanya berkaitan dengan sektor perdagangan saja, melainkan juga merambah ke sektor pertanian. Kesepakatan kala itu disaksikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Turki Abdullah Gul. Isi dari kesepakatan tersebut terdiri dari lima MoU, dua kesepakatan, dan satu program. Selain itu Turki juga memberikan penawaran kepada pemerintah Indonesia untuk membuka kantor cabang CPO di Turki. Hal tersebut diutarakan oleh perwakilan dari pemerintah

Turki sebagai upaya untuk memperluas peluang Indonesia mengeksport minyak sawitnya ke negara-negara Balkan (Subagyo 2014).

Selama kepemimpinan Erdogan Turki dianggap sebagai momok bagi negara-negara barat karena mampu bertahan serta diperhitungkan sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting secara internasional. Maka dari itu, Turki berupaya untuk terus menjaga eksistensinya dengan melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mencapai kepentingan negaranya. Indonesia menjadi salah satu negara yang terus memperbaiki hubungannya dengan Turki khususnya untuk mencapai kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan. Pasca kunjungan Menteri Luar Negeri Turki Mevlud Cavusoglu ke Indonesia, kedua negara sepakat untuk menaikkan nilai perdagangan hingga 6 kali lipat. Selain itu juga menyatakan bahwa Indonesia dinilai memiliki kualitas yang baik dalam industri pertahanan serta mempunyai harga yang kompetitif dan tidak ada halangan politik di dalamnya. Kedatangan Kementerian Luar negeri Turki tersebut juga memastikan peningkatan kerjasama di sektor infrastruktur melalui program *Private Public Partnership* (PPP) (Aldila 2020). Selain itu kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Turki merambah ke bidang energi. Pengelolaan energi yang baik berdampak terhadap perekonomian dan ketahanan nasional yang perlu dikerjakan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini diperuntukkan mengingat kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat dan Indonesia berfokus terhadap kebutuhan energi listrik di wilayah kepulauan Indonesia. Kunjungan Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2017 merupakan kunjungan balasan kepada pemerintah Turki dan sebagai bentuk upaya yang dilakukan terkait kesepakatan kerjasama Indonesia Turki. Melalui perjanjian IT-CEPA yang disepakati oleh kedua negara maka peluang pengembangan ekonomi juga semakin terbuka. Khusus di bidang energi, Indonesia terbantu dengan penyedia pasokan listrik berbentuk kapal yang disebut sebagai Karadeniz Powership. Dipilihnya perusahaan kapal

Marine Vessel Power Plant (MVPP) oleh pemerintah Indonesia karena memiliki harga jual yang lebih murah dibanding negara lain. Selain itu pemilihan kerjasama tersebut menjadi salah satu faktor untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki (Aminah Suhayya Lubis 2021).

3.1.3 Konteks Internasional

Konteks internasional yang dijelaskan oleh William D. Coplin di dalam bukunya adalah bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem yang ada, menentukan bagaimana negara itu akan bekerja. Selain itu konteks internasional merupakan sebuah produk tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang yang mungkin atau yang akan diantisipasi oleh para pengambil keputusan (Coplin 2003). Dengan begitu pada bagian ini penulis akan menjelaskan kondisi internasional yang terjadi sehingga mendorong Turki untuk membuat kebijakan bebas visa yang diberikan kepada Indonesia. Dalam konteks internasional, menurut penulis hubungan baik antara Turki dan Indonesia merupakan faktor yang mendorong Turki memberlakukan kebijakan bebas visa kepada Indonesia. Selain itu kerjasama di pelbagai bidang yang dapat menguntungkan Turki juga mendorong kebijakan tersebut diberlakukan.

Turki dan Indonesia memiliki pengaruh dan peran penting sebagai middle power. Keduanya menjadi anggota dari MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan Turki dan Australia). MIKTA sendiri merupakan sebuah forum negara-negara middle power yang berperan aktif dalam upaya mengatasi berbagai tantangan global. Selain itu keberadaan MIKTA dapat dimanfaatkan oleh negara anggota sebagai peluang untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan diplomasi publik, pendidikan dan sosial budaya. Berjalannya kerjasama mikta terdapat beberapa kendala diantaranya adalah *Non-Territorial Platform* yaitu

keberadaan negara-negara anggota yang terpisah secara geografis dan mempunyai beban konflik teritorial di negaranya masing-masing. Kepentingan Turki dari Indonesia sebagai negara middle power tertuang dalam konsep *Cross-Historical Learning*. Di dalamnya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang merepresentasikan perpaduan Islam dengan modernitas, demokrasi, kepulauan, dan iklim tropis. Sedangkan Turki merupakan negara yang merepresentasikan bertemunya Asia dan barat, Islam dengan demokrasi, modernitas, dan iklim subtropis. Beberapa alasan tersebut menjadi model penting bagi Turki maupun Indonesia sebagai anggota middle power untuk mengembangkan pembelajaran dan membangun kapasitas dalam kebijakan publik serta membangun kualitas demokrasi dan ekonomi. Selain itu terdapat kerangka perjalanan penting Indonesia sebagai anggota MIKTA yaitu diplomasi middle power. Konsep ini merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang sudah dirumuskan dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan regional untuk turut andil secara aktif mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia (Rio Budi Rahmanto 2022).

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam penerapan kebijakan tersebut adalah dampak dari pandemi covid-19 yang menerpa hampir seluruh negara di dunia. Sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terdampak akibat pandemi covid-19. Adanya pembatasan terhadap kegiatan masyarakat, kegiatan jual beli, perdagangan, hingga aktivitas yang penting membuat pergerakan ekonomi mengalami penurunan. Bahkan di wilayah Eropa terjadi peningkatan pengangguran yang diakibatkan dari pandemi covid-19 sehingga memunculkan kekhawatiran secara global untuk setidaknya meminimalisir bahkan menghilangkan dampak negatif yang dihasilkan dari adanya pandemi covid-19. Setiap negara berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan strategi yang disesuaikan dengan keadaan negara tersebut. Hal yang paling parah dari dampak pandemi covid adalah terjadi resesi ekonomi sehingga memunculkan opini

dan ide untuk mengatasi pelemahan ekonomi supaya terus bertahan di tengah pandemi covid-19 (ARIANTO 2020).

Secara konteks internasional, kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh Turki terhadap Indonesia merupakan salah satu upaya di tengah pandemi covid-19 untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata di negaranya. Kebijakan yang resmi diberlakukan sejak 24 Desember 2021 tersebut memiliki tujuan yang baik dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang mengatakan "Memandang hubungan persaudaraan selama berabad-abad antara warga Turki dan orang Indonesia, dan juga sebagai bentuk kemitraan strategis antara kedua negara, Turki memutuskan mencabut persyaratan visa untuk warga Indonesia yang melancong ke Turki". Selain itu kebijakan yang berdasarkan Keputusan Presiden nomor 4930 tersebut juga sebagai langkah baik yang diambil oleh Turki untuk meningkatkan persaudaraan dengan Indonesia serta sebagai upaya untuk mempromosikan hubungan antar individu dan hubungan bisnis yang melibatkan negara atau warga negara dari Indonesia dan Turki (Erina 2020).

3.2 Peran Policy Infuencer dalam Kebijakan Luar Negeri Turki

Dalam penerapan kebijakan bebas visa oleh Turki terhadap Indonesia terdapat pengaruh dari policy influencer. Pengaruh policy influencer dalam penelitian ini melibatkan aktor pemerintah domestik dan non domestik. Kedekatan personal antara Presiden Erdogan dan Presiden Joko Widodo menjadi indikasi dari pengaruh policy influencer non domestik dalam hal ini yang dapat memberikan pertimbangan pemerintah Turki dalam menerapkan sebuah kebijakan terhadap Indonesia. Saat kunjungan presiden Joko Widodo ke Turki pada tahun 2017 terlihat kedekatan antara pemimpin kedua negara melalui video vlog yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam vlog tersebut Presiden Erdogan menyampaikan penghormatan kepada seluruh

masyarakat Indonesia dari dirinya dan sekaligus mewakili masyarakat Turki. Selain itu ia juga mengharapkan kunjungan tersebut sebagai upaya memperkuat solidaritas antara Turki dan Indonesia dalam kerjasama dan memberikan pengaruh positif di kancah internasional pada masa yang akan datang (Humas 2017). Sedangkan aktor domestik yang berpengaruh dalam penerapan kebijakan bebas visa terhadap Indonesia adalah pihak-pihak birokrat di dalamnya terdapat kementerian-kementerian dari pemerintahan Turki.

Kemudian terdapat peran dari *Adelet ve Kalkinma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan merupakan sebuah partai di Turki yang didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan. Dalam beberapa tahun terakhir partai ini mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat Turki dan memperoleh kepercayaan. Salah satu faktor dukungan dari masyarakat Turki adalah pandangan negatif terhadap partai-partai sekuler yang sering terkena kasus korupsi dan menyebabkan turunnya perekonomian negara. Di tengah penurunan kepercayaan terhadap partai-partai sekuler, AKP membuat pandangan yang baik sebagai partai yang bersih dari kasus-kasus seperti korupsi dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dari kesuksesan selama memimpin pemerintahan dengan menjaga stabilitas ekonomi Turki sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai AKP semakin meningkat. AKP yang dipimpin Erdogan juga berupaya untuk meningkatkan nilai demokrasi dan hak asasi serta menekan pengaruh militer dalam keterlibatannya di politik seperti yang sudah dialami oleh pemerintah Turki sebelumnya (Fadhila 2019). Selain keterlibatan kedekatan personal antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan, terdapat pengaruh dari partai eksternal Turki yaitu Partai Kesejahteraan Sosial dari Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan PKS yang mendukung penuh dan memuji pencapaian dari partai AKP Turki. Hal ini lantaran partai AKP ikut aktif dalam perjuangan rakyat Palestina, Suriah, Irak dan negara Timur Tengah yang sedang diterpa perang. Sehingga peran aktif tersebut memberikan pengaruh

dalam kebijakan luar negeri Turki khususnya dalam keterlibatan mereka menjaga perdamaian dunia (Damarjati 2015).

Sebagai pemimpin di negara Turki, Presiden Erdogan menjadi salah satu aktor yang berperan penting dalam penerapan kebijakan bebas visa oleh Turki kepada Indonesia. Presiden Erdogan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Turki memberikan pertimbangan dan keputusan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Turki. Melihat kondisi yang terjadi saat itu yaitu pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, maka pertimbangan paling utama adalah upaya dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Terlebih sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penting bagi Turki dalam masa pemerintahan Presiden Erdogan untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah Turki mengambil langkah lebih lanjut untuk menghindari dampak negatif dari covid-19 khususnya dalam peningkatan ekonomi dengan cara memberlakukan kebijakan bebas visa terhadap warga negara Indonesia. Meskipun presiden sebagai aktor tunggal yang mempunyai kewenangan untuk menentukan sebuah kebijakan, para menteri yang berada di sekelilingnya juga memberikan pengaruh yang besar terhadap sebuah kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh presiden.

Maka dalam hal ini, policy influencer yang berpengaruh dalam penerapan kebijakan bebas visa Turki terhadap Indonesia adalah anggota birokrat (bureaucratic Influencer) dan partai (partisan Influencer). Kedua tipe policy influencer di atas memiliki kesinambungan untuk memberikan pengaruhnya dalam penerapan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap Indonesia. Selain keterikatan dengan hubungan yang baik, dalam penerapan kebijakan terdapat pengaruh-pengaruh yang diberikan dari pihak birokrat kepada Presiden seperti pernyataan-pernyataan dan kolaborasi program yang mendukung serta mendorong presiden untuk merealisasikan kebijakan bebas visa kunjungan kepada Indonesia di akhir tahun 2021.

Tabel 1.2 Pernyataan Policy Influencer

No	Policy Influencer	Pernyataan	Media Publikasi
1	Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi	Memandang hubungan erat antara masyarakat Indonesia dan Turki yang telah terjalin selama berabad-abad, serta kemitraan strategis antara kedua negara kita Turki telah memutuskan untuk membebaskan wajib visa bagi warga Indonesia untuk bepergian ke Turki	Antara News (24 Des 2023)
2	Kedubes Turki di Indonesia	Kami meyakini bahwa langkah yang diambil oleh Turki ini akan mendorong hubungan erat yang telah dimiliki oleh kedua negara, dan mempromosikan hubungan antar-masyarakat serta hubungan bisnis	JPNN.com (24 Des 2023)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh Turki kepada Indonesia melalui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi berlaku pada tanggal 24 Desember 2021. Keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden nomor 4930 yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021 dalam berita negara Republik Turki (Mutiah 2021). Sesuai dengan yang dijelaskan oleh William D. Coplin dalam Decision Making Theory terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri.

Situasi domestik Turki pada saat itu berfokus kepada masalah ekonomi terlebih dengan munculnya covid-19 yang menimpa hampir seluruh negara di dunia sehingga memantik politik Turki dan memungkinkan untuk membuat kebijakan dalam ataupun luar negeri. Peran dari Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang memberikan pengaruh Turki dalam menerapkan kebijakan terhadap Indonesia. Maka dari itu Presiden Erdogan berupaya untuk menghindari konflik agar tidak berkepanjangan melalui pengelolaan krisis dengan penanganan yang baik melalui kebijakan yang dibuatnya. Upaya pemerintah Turki untuk menerapkan kebijakan yang sesuai berpotensi memberikan dampak positif khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik negaranya.

Kemudian berkaitan dengan *kondisi ekonomi* sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan. Sama halnya dengan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Turki dan Indonesia. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Turki dan Indonesia memiliki tujuan yang positif dalam kepentingan nasional

masing-masing negara. IT-CEPA menjadi bukti adanya komitmen kerjasama ekonomi sebagai bentuk mitra perdagangan yang bertujuan sebagai upaya peningkatan ekonomi bagi kedua negara.

Dalam *konteks internasional* hubungan baik antara Turki dan Indonesia menjadi salah satu faktor pemerintah Turki yang memberlakukan kebijakan bebas visa kepada Indonesia. Kerjasama antara Turki dan Indonesia memunculkan potensi positif di berbagai sektor mulai dari pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal di atas dibuktikan dengan kemitraan strategis antar kedua negara serta memiliki prinsip yang sama terhadap perdamaian domestik maupun perdamaian global. Keterlibatan atau keikutsertaan Turki dan Indonesia dalam organisasi atau kerjasama internasional seperti keanggotaannya dalam MIKTA, kerjasama IT-CEPA, atau berperan aktif dalam G20 juga menjadi pertimbangan pemerintah Turki dalam menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan kepada Indonesia terlebih Turki melihat potensi wisatawan Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Adanya virus covid-19 secara global juga menjadi faktor pendorong diterapkannya kebijakan dari pemerintah Turki sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata bagi negaranya. Maka dari itu, berbagai kerjasama atau kesepakatan yang dilakukan antara Turki dan Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat hubungan bilateral.

Selain itu adanya pengaruh yang diberikan oleh Bureaucratic influencer dan Partisan influencer yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Pihak-pihak birokrat yang terlibat dan memiliki pengaruh dalam penerapan kebijakan yang diberikan kepada Indonesia diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kementerian Kesehatan. Mereka memberikan pengaruh kepada Presiden Erdogan melalui pernyataan-pernyataan serta bukti dari hasil program yang dijalankan dalam penerapan kebijakan bebas visa.

Melalui pernyataan-pernyataan dan program yang tepat dari birokrat pemerintahan mendorong pemegang kekuasaan atau penentu kebijakan untuk akhirnya menetapkan penerapan kebijakan bebas visa kunjungan kepada warga negara Indonesia. Kedekatan personal antara Presiden Erdogan dan Presiden Joko Widodo juga mempengaruhi penerapan kebijakan. Kemudian peran dari partai AKP di bawah kepemimpinan Erdogan yang turut andil di berbagai kebijakan termasuk keterlibatan Turki dalam mendukung kebebasan Palestina dari Israel.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan dalam penelitian ini, Pertama penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Menurut penulis terdapat beberapa kekurangan dan celah yang ada dalam penelitian ini diantaranya terkait data mengenai tantangan dan kendala dalam penerapan kebijakan dan kerjasama. Dengan penambahan data yang sesuai seperti wawancara dengan pihak terkait akan dapat memperjelas dinamika dalam penerapan kebijakan bebas visa. Kemudian penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis data tentang hubungan Turki dan Indonesia pasca berjalannya penerapan kebijakan bebas visa.

Peneliti juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah Turki dan Indonesia agar benar-benar menjalankan semua kesepakatan yang ada dalam proses kerjasama yang akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dengan melihat citra positif dari hubungan yang sudah terjalin, maka Turki dan Indonesia perlu untuk terus memperbaiki hubungan melalui pelaksanaan kesepakatan yang sudah disetujui termasuk dalam penerapan kebijakan bebas visa yang diberikan oleh pemerintah Turki kepada warga negara Indonesia. Dengan begitu publik juga akan mengetahui bahwa salah satu tujuan penerapan kebijakan bebas visa tersebut adalah

untuk menjaga kestabilan perekonomian Turki dan sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki serta memperkuat hubungan antara Turki dan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Khairil Musthafa, Hanik Purwati. 2022. "Sejarah dan Transformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme ." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 1032-1046.
- Aksoy, Hürcan Aslı. 2020. "Turkey and the Corona Crisis: The Instrumentalization of the Pandemic for Domestic and Foreign Policy." *Geographical Overview | MPC's. Middle East and Turkey* 240-243.
- Aldila, Nindya. 2020. *Nilai Perdagangan Indonesia-Turki Ditargetkan Naik 6 Kali Lipat*. Desember 22. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201222/12/1334195/nilai-perdagangan-indonesia-turki-ditargetkan-naik-6-kali-lipat>.
- Alhayat, Aditya P. 2011. "ANALISIS STRUKTUR DAN POTENSI PERDAGANGAN INDONESIA-TURKI." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 63-83.
- Amaliya, Lailyatul. 2022. "ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN TURKI MELALUI INDONESIA-TURKI KOMPREHENSIF ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IT-CEPA)." *UMM Library* 35-37.
- Aminah Suhayya Lubis, Ibnu Zulian. 2021. "KERJASAMA INDONESIA-TURKI DIBIDANG ENERGI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2015-2020." *Jurnal FISK* 94-100.
- Anak Agung Gede Dwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, Ni Luh Dewi Sundariwati. 2022. " PRINCIPLES OF SELECTIVE IMMIGRATION POLICY IN RELATION TO VISA FREE ENTRY FOR TOURISM PURPOSES." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 237-241.

- Andriani, Dewi. 2021. *BISNIS STYLE*. 5 4. Accessed 6 15, 2023. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210504/361/1390290/strategi-pemerintah-turki-genjot-wisatawan-di-tengah-pandemi>.
- ARIANTO, BAMBANG. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia." *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)* 106-126.
- Asean, Turis Indonesia ke Turki Terbanyak dibanding Negara. 2018. *BBC NEWS INDONESIA*. 2 1. Accessed 8 23, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42861764>.
- Assilmy, Fauzia. 2021. "REALISME DALAM KEBIJAKAN INTERVENSI MILITER TURKI DI LIBYA." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 1257-1267.
- Azzam, Muhammad Abdullah. 2020. *TURKIYE, BUDAYA, NASIONAL*. 8 18. Accessed 8 24, 2023. <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kala-rakyat-turki-mengenal-indonesia-dari-kunjungan-soekarno/1945055>.
- BPKH, Humas. 2020. *Di Masa Pandemi Covid-19, Erdogan Pulihkan Pariwisata Turki*. Desember 28. <https://bpkh.go.id/di-masa-pandemi-covid-19-erdogan-pulihkan-pariwisata-turki/>.
- Coplin, William D. 2003. *PENGANTAR POLITIK INTERNASIONAL Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Coşkun, Bezen Balamir. 2016. "The Post-Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy." *E-International Relations* 1-3.
- Damarjati, Danu. 2015. *Detik News*. 11 4. Accessed 8 25, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-3062184/pks-jadikan-partai-penyokong-presiden-turki-erdogan-sebagai-panutan>.

- Dityo, Laksana Wirajati Anugrah. 2020. "INDONESIA TURKI COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (CEPA)." *ALETHEA Jurnal Ilmu hukum* 155-172.
- DPR-RI, BKSAP. 2023. *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA*. 8 9. Accessed 8 25, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45827/t/GKSB+BKSAP+DPR+RI+Terima+Kunjungan+Kehormatan+Turki>.
- Elvira Belinda Mantiri, Johanis Franco Peilouw, Lucia Charlota Oktavina Tahamata. 2021. "Kebijakan Bebas Visa bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 8-13.
- Erina, Reni. 2020. *Wisata Halal Turki Moncer di Tengah Pandemi*. 11 17. Accessed 7 20, 2023. <https://dunia.rmol.id/read/2020/11/17/461535/wisata-halal-turki-moncer-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- Fadhila, Naufal Fasha. 2019. "Gaya Kepemimpinan Erdogan Untuk Mengembalikan Kejayaan Islam di Turki." 1-15.
- Fericandra, Andraina Ary. 2016. "Keterbatasan Implementasi Neo-Ottomanisme dalam Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Israel (2009-2014)." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 12-24.
- Ferika Pujiharini, Masharu Ichihashi. 2016. "The Impact of Visa-Free on Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia." *IDEC* 1-27.

- Hans Michael Ehl, Dyan Kostermans. 2010. *Strategi Turki Tingkatkan Sektor Pariwisata*. Maret 18. <https://www.dw.com/id/strategi-turki-tingkatkan-sektor-pariwisata/a-5367362>.
- Harahap, Hendri. 2018. "PERJUANGAN RECEP TAYYIP ERDOGAN DARI REPUBLIK TURKI SEKULAR MENUJU NASIONALISME ISLAMIS." *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban* 77-88.
- Humas. 2017. *SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA*. 7 7. Accessed 8 25, 2023. <https://setkab.go.id/sampaikan-pesan-solidaritas-persahabatan-presiden-jokowi-unggah-vlog-bersama-presiden-erdogan/>.
- HUMAS. 2017. *SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA*. 7 6. Accessed 8 23, 2023. <https://setkab.go.id/hari-ini-di-ankara-presiden-jokowi-dan-presiden-erdogan-luncurkan-it-cepa/>.
- ILYAS, ANDI ISWAN. 2018. "AMBIVALENSI KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI DI BAWAH KEPEMIMPINAN ERDOGAN TERHADAP ISRAEL." *digilib.unhas.ac.id* 11-105.
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri. 2020. *Joint Declaration Indonesia-Turkey-Kemlu*. July 4. https://kemlu.go.id/ankara/id/pages/hubungan_bilateral/51/etc-menu.
- INDONESIA, KEMENTRIAN LUAR NEGERI REPUBLIK. 2022. *Daftar Kerja Sama Multilateral \Developing Eight (D-8)*. 12 9. Accessed 8 24, 2023. https://kemlu.go.id/portal/id/read/143/halaman_list_lainnya/developing-eight-d-8.

- Indrawati, Saskia. 2020. "Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Era SBY dan Era Jokowi Dengan Perdagangan Bilateral Indonesia-Turki (2004-2019)." *UNPAR Repository* 1-26.
- Junaidi, Ahmad. 2016. "Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 142-195.
- KBRI-Turki. 2021. "Rencana Strategis Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Turki Berkedudukan di Ankara Tahun 2020-2024." 1-39.
- Kramer, Matthew H. 2017. "There's Nothing Quasi About Quasi-Realism: Moral Realism as a Moral Doctrine." *Jurnal Ethics* 185-212.
- Maharani, Afisyah Mutiara. 2021. "UPAYA KOMERSIAL TURKI UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA DI ERA NEW NORMAL." *unsri.ac.id* 1-4.
- Mu'ammam, M Arfan. 2016. "KRITIK TERHADAP SEKULARISASI TURKI Telaah Historis Transformasi Turki Usmani." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 117-145.
- Musyaffa, Iqbal. 2020. *Turki bisa jadi contoh bagi Indonesia dalam pengembangan pariwisata.* November 11. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/turki-bisa-jadi-contoh-bagi-indonesia-dalam-pengembangan-pariwisata/2040234>.
- Mutiah, Dinny. 2021. *Turki Berlakukan Bebas Visa bagi Wisatawan Indonesia, Bisa Lebih Leluasa Kunjungi Cappadocia.* 12 31. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4845606/turki-berlakukan-bebas-visa-bagi-wisatawan-indonesia-bisa-lebih-leluasa-kunjungi-cappadocia>.

- Nizar, Mohd Zahamri bin. 2011. "Ikonografi Zulfikar dalam Sejarah Hubungan Turki dan Nusantara." *Jurnal Suhuf* 117-119.
- Nurul Pratiwi, Yoni Basyir Wira, Muksalmina Muksalmina. 2021. "EFEKTIFITAS PEMBERIAN KEBIJAKAN BEBAS VISA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK 169 WARGA NEGARA ASING." *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 99-101.
- Orak, Prof. Dr. Kemal. 2021. "ANALYSIS OF THE VISA RESTRICTIONS ON TRADE RELATIONS BETWEEN TURKI AND THE EUROPEAN UNION." *ANATALYA DIPLOMACY FORUM* 1-3.
- Pujiyono. 2016. "MOTIVASI INDONESIA BERKERJASAMA DENGAN TURKI DALAM MENINGKATKAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) (2010-2014)." *JOM FISIP* 1-14.
- Putri, Melsa Yunika. 2021. "KEPENTINGAN INDONESIA MENJALIN KERJASAMA DENGAN TURKI PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2020)." *unsri.ac.id* 1-23.
- Rahmad fauzan, Saeno. 2021. *Bisnis Indonesia*. 10 13. Accessed 8 24, 2023. <https://bisnisindonesia.id/article/indonesiaturki-dari-soekarno-hingga-kerja-sama-pertahanan>.
- Rio Budi Rahmanto, PhD. 2022. "Agenda Prioritas Keketuaan Indonesia Pada MIKTA 2023." *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN)* 4-130.

- Stiglmyer, Alexander. 2012. "VISA-FREE TRAVEL FOR TURKEY: IN EVERYBODY'S INTEREST." *Turkish Policy Quarterly* 99-109.
- Subagyo. 2014. *Turki minta Indonesia tingkatkan ekspor CPO*. Februari 19. <https://www.antaranews.com/berita/419930/turki-minta-indonesia-tingkatkan-ekspor-cpo>.
- Sudarwati, Yuni. 2015. "Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat." *Jurnal: Info Singkat*.
- Syakir. 2020. "PENGARUH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN." *Jurnal Syntax Admiration* 262-276.
- Syakur, Muhammad Abdus. 2017. *Hidayatullah.com*. 7 8. Accessed 8 23, 2023. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2017/07/08/119497/pertemuan-jokowi-dan-erdogan-di-ankara-indonesia-turki-bicarakan-solusi-krisis-qatar.html>.
- Thabrani, Gamal. 2021. *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*. 2 11. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>.
- Triyansyah, Wova. 2019. "DEMOKRATISASI DAN POLITIK POPULISME DI TURKI: STUDI TENTANG PEMERITAHAN PADA ERA RACEP TAYYIP ERDOGAN (2005-2015)." *repository.uinjkt.ac.id* 12-90.
- Tutut Herawan, M Bachtiar Rifai, Arneta Rohma Agustina, Dhinita Dwi Rachmalya, Eufemia Sarina, Sultan Sabiq Arrafi, Astin Agustin. 2023. "Wisata Virtual di the Louvre Museum

- Paris dan Pasar Terapung Pattaya Menggunakan Teknologi Virtual Reality Berbasis Youtube." *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK)* 304-339.
- UMY. 2018. "Gambran Politik Luar Negeri Turki." *http://repository.umy.ac.id* 21-33.
- Visa, Kebijakan Bebas. 2020. *KBRI DI ANKARA*. July.
https://kemlu.go.id/ankara/id/pages/hubungan_bilateral/51/etc-menu.
- Wicaksono, Moddie Alvianto. 2021. "DAMPAK EKONOMI KEBIJAKAN PARIWISATA RECEP TAYYIB ERDOGAN PADA TAHUN 2003-2011 DAN 2014 DI TURKI." *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 49-57.
- Wicipto Setiadi, Rakha Aditya Afrizal. 2019. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 312-321.
- Yoni Basyir Wira, Nurul Pratiwi, Muksalmina Muksalmina. 2021. "EFEKTIFITAS PEMBERIAN KEBIJAKAN BEBAS VISA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK 169 WARGA NEGARA ASING." *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 99-101.
- YOON, HYUNSOO. 2019. "TURKISH FOREIGN POLICY AND STRATEGIC PARTNERSHIP IN ASIA-PACIFIC." *open.metu.edu.tr* 16-85.
- Zuboidi, Hayatullah. 2018. "KEPENTINGAN UTSMANI MENJALIN HUBUNGAN DENGAN KERAJAAN ACEH DARUSSALAM." *Jurnal Peurawi* 115-117.